

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH DI BIDANG
KEUANGAN DINAS PERENCANAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S1 Akuntansi



Disusun oleh :

FATIN MUNAWAROH FAJRIYAH

NIM : 31401900061

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DI
BIDANG KEUANGAN DINAS PERENCANAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KUDUS**

Disusun oleh:

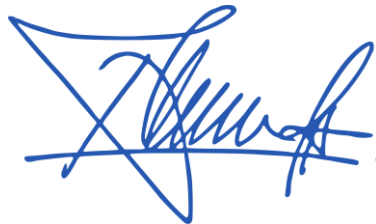
Fatin Munawaroh Fajriyah

Nim: 31401900061

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian SKRIPSI MB-KM
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 7 Januari 2023

Dosen Pembimbing Mahasiswa



Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA

HALAMAN PERSETUJUAN

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN
DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DI BIDANG
KEUANGAN DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUDUS**

Disusun oleh:

Fatin Munawaroh Fajriyah

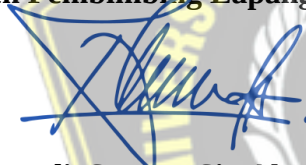
Nim: 31401900061

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 10 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan



Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA

NIDN. 0610107001

Dosen Penguji II



Dr. Sri Anik, S.E., M.Si., Akt., CA

NIDN. 0613086401

Dosen Penguji I



Dr. Hj. Indri Kartika, M.Si., Akt., CA

NIDN. 0613086401

SKRIPSI MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi tanggal 10 Februari 2023

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti SE., M.Si, Ak,CA

NIDN. 0611088001

PERNYATAAN LAPORAN MAGANG

Nama : Fatin Munawaroh Fajriyah

NIM : 31401900061

Prodi : S1 Akuntansi

Jurusan : Akuntansi Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan laporan penelitian berjudul **“Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah di Bidang Keuangan Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti laporan magang ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 7 Januari 2023

Yang menyatakan,

Fatin Munawaroh Fajriyah

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan SKRIPSI MB-KM yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah di Bidang Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus”**, yang diselesaikan dengan sebaik-baiknya serta di dalam penyusunannya melibatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berperan dalam penyelesaian laporan pelaksanaan magang ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si, Ak, CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Ibu Profita Wijayanti, S.E., M.Si., Akt., CA Selaku Kepala Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
3. Bapak Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA. Selaku dosen pembimbing mahasiswa yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama bimbingan sampai sidang dilaksanakan serta perbaikan laporan ini
4. Seluruh Dosen dan Staff bagian Administrasi Pengajaran Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendukung penulis dalam urusan perijinan dan lain-lain
5. Ibu Diyah Winarni, S.E., M.M. selaku supervisor yang membimbing pelaksanaan kegiatan magang MB-KM

6. Dinas PUPR Kabupaten Kudus dan Bapak dan Ibu ASN/ Tenaga kerja di lingkungan Bidang Keuangan dan Kesekretariatan yang sudah menyambut dan mewadahi proses penulisan laporan
7. Kedua Orang tua tercinta dan tersayang Bapak Solikin dan Ibu Zarkotik yang senantiasa telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang selama pengerjaan dan pelaksanaan penulisan laporan
8. Kakak tersayang Ali Mudlofar Ma'sum dan Latifatun Istiqomah yang senantiasa mendukung sarana dan prasarana penulis dalam penyusunan laporan
9. Teman dekat dan sahabat penulis (Levena, Fatika, Indah, Putri Nilla) dan kelas E2 S1 Akuntansi 2019 yang selalu menemani dan menghibur penulis, memberi semangat serta makian
10. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting

Besar harapan penulis untuk penulisan laporan ini. Namun, penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi motivasi selanjutnya untuk membuat laporan yang lebih baik lagi.

Kudus, Februari 2023

Penulis

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA) merupakan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dari Pemerintah ke Dinas PUPR Kabupaten Kudus dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. Meskipun sudah menggunakan sistem SIMDA Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus terlambat menyajikan laporan keuangan tahun 2021 karena masih banyaknya kesalahan pengguna dalam menyajikan laporan keuangan dan penerapan aplikasi SIMDA Keuangan yang masih baru. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah dengan menggunakan pendekatan evaluasi formal. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan staff akuntansi di Bidang Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Hasil analisis pembahasan adalah pengguna menerima SIMDA Keuangan dan permasalahan yang ada bukan hanya pada penggunaannya saja, akan tetapi juga dari sistemnya yang masih terkendala dan perlu diperbaiki kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

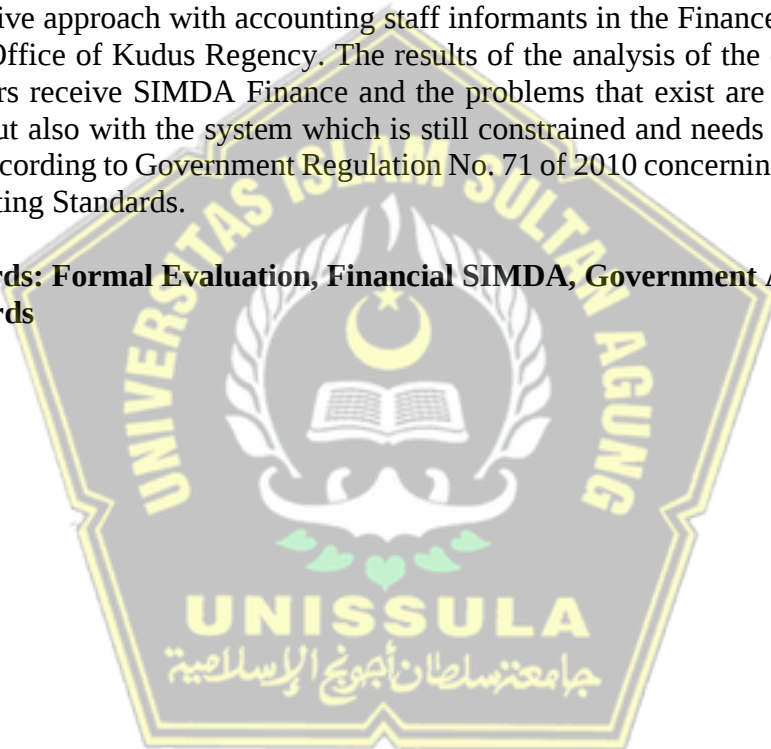
Kata Kunci : Evaluasi Formal, SIMDA Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah



ABSTRACT

The Regional Financial Management Information System (SIMDA) is an integrated financial reporting system from the Government to the PUPR Office of the Kudus Regency and the Kudus Regency Regional Financial and Asset Management Agency. Even though they have used the SIMDA Finance system, the PUPR Service for Kudus Regency was late in presenting the 2021 financial reports because there were still many user errors in presenting financial reports and the implementation of the SIMDA Finance application which was still new. The aim and objective of this study is to determine the acceptance of the use of Regional Financial Management Information Systems and Government Accounting Standards using a formal evaluation approach. The method used is a qualitative descriptive approach with accounting staff informants in the Finance Sector of the PUPR Office of Kudus Regency. The results of the analysis of the discussion are that users receive SIMDA Finance and the problems that exist are not only with users, but also with the system which is still constrained and needs to be repaired again according to Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

Keywords: Formal Evaluation, Financial SIMDA, Government Accounting Standards



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN LAPORAN MAGANG	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	6
1.3 Sistematika Laporan Magang	6
BAB II	10
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG	10
2.1 Profil Organisasi	10
2.1.1 Struktur Organisasi	10
2.1.3 Visi dan Misi Organisasi	13
2.1.4 Sistem Laporan Keuangan Dinas PUPR	13
2.2 Aktivitas Magang	15
2.2.1. Deskripsi Kegiatan Magang	15
2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang di Dinas PUPR Kudus	16
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH	18
3.1 Evaluasi Penerapan SIMDA Keuangan	19
3.2 Analisa kualitas laporan keuangan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus	22
BAB IV	24
KAJIAN PUSTAKA	24
4.1 Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah	24

Evaluasi (Formal Evaluation).....	24
Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA).....	26
4.2 Penerapan dan Evaluasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	31
BAB V	35
METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA.....	35
5.1 Jenis Penelitian	35
5.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	35
5.3 Subjek dan Objek Lapangan.....	35
5.4 Metode Pengumpulan Data.....	36
5.5 Analisis Data	36
BAB VI.....	37
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	37
6.1 Analisis Hasil Pengamatan	37
6.2 Hasil dan Pembahasan	39
6.2.1 Evaluasi Penerapan SIMDA Keuangan	42
1. Pemahaman Masing-masing Pegawai tentang SIMDA Keuangan.....	42
2. Kepuasan dalam Penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan.....	47
3. Pengembangan SIMDA Keuangan	83
6.2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	84
BAB VII.....	90
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	90
7.1 KESIMPULAN	90
7.2 REKOMENDASI.....	91
BAB VIII.....	93
REFLEKSI DIRI.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kudus	10
Gambar 6. 1 Pengolahan data pada Bidang Keuangan Dinas PUPR Kab.Kudus .	46



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jam Kerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus	16
Tabel 3. 1 Data Hasil Kuesioner Penerapan SIMDA Keuangan	19
Tabel 6. 1 Data Nama Informan.....	39
Tabel 6. 2 Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin	40
Tabel 6. 3 Karakteristik informan berdasarkan umur informan.....	40
Tabel 6. 4 Karakteristik informan berdasarkan Pendidikan terakhir informan.....	41
Tabel 6. 5 Karakteristik informan berdasarkan jabatan pekerjaan informan	41
Tabel 6. 6 Perbandingan penyelesaian waktu standar dan waktu faktual	48
Tabel 6. 7 Jumlah Alat Infrastruktur Bidang Keuangan Dinas PUPR.....	49
Tabel 6. 8 Kuesioner Kepuasan Penggunaan SIMDA Keuangan.....	50
Tabel 6. 9 Kuesioner Kepuasan Penggunaan SIMDA Keuangan.....	50
Tabel 6. 10 Kuesioner Kepuasan Penggunaan SIMDA Keuangan ..	51
Tabel 6. 11 Kuesioner Kepuasan Penggunaan SIMDA Keuangan.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini menjadi sesuatu perkembangan yang tidak dapat dihindari masyarakat di dunia. Indonesia sebagai masyarakat dunia memiliki kewajiban berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan suatu daerah yang baik sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan atau akuntansi daerah tersebut, dimana kondisi keuangan suatu daerah tercermin dalam laporan keuangan yang disajikan. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Laporan keuangan adalah salah satu bagian dari proses pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi uang yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai cara untuk melaporkan kondisi keuangan suatu daerah pemerintah, oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan harus relevan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penggunaan sarana dan prasarana teknologi informasi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan juga menjadi salah satu hal yang penting, karena berpengaruh terhadap hasil laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi akan memudahkan pimpinan atau pegawai dalam pengerjaan laporan keuangan.

Menurut PP NO. 71 TAHUN 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah . Prinsip akuntansi tersebut berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah menggunakan SAP berbasis akrual, dimana SAP berbasis akrual dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

Baik instansi pemerintah atau perusahaan memiliki kesamaan tujuan dalam hal kualitas pelayanan yaitu menginginkan pelayanan yang berdampak *output* positif ke dalam organisasi. Instansi pemerintah juga memiliki tujuan untuk memuaskan pengguna layanannya sebagai tujuan utama, karena kepuasan pengguna layanan tersebut merupakan salah satu indikasi keberhasilan dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas. Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan dapat memperbaharui materi standar pelayanan publik yang disesuaikan dengan perkembangan birokrasi maupun sistem teknologi. Jika kualitas laporan keuangan dan penyampaian informasi yang kurang baik dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berlangsung terus menerus, akan membuat perusahaan ataupun instansi merasa gagal dalam mengatasi kebutuhan pelayanan. Hal ini akan memberikan persepsi negatif terhadap perusahaan.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses penyusunan laporan dan data keuangannya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam (Peraturan

Pemerintah, 2005) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Atas dasar inilah BPKP kemudian mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) salah satunya yaitu SIMDA Keuangan dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan khususnya di bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Penerapan SIMDA Keuangan harus memenuhi beberapa kriteria sehingga dikatakan efektif. Efektivitas penerapan sistem informasi merupakan hasil yang diperoleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh pemerintah daerah mengungkapkan sebanyak 1.586 kasus temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan pada 408 entitas, yang mengindikasikan masih belum baiknya kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah, seperti; proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, keterlambatan penyampaian laporan keuangan, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan belum didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Ditemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi SIMDA, diantaranya: yaitu masih ada pegawai bagian keuangan baik itu bendahara maupun operator SIMDA Keuangan yang mengoperasikan aplikasi tersebut dengan alasan penggunaannya yang rumit karena

selalu adanya pembaharuan atau *update* pada aplikasi SIMDA Keuangan karena data yang diinput terlalu banyak, sementara masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan, dan perlu dilakukan pengkajian lebih jauh mengenai efektivitas penerapan SIMDA keuangan dalam penyusunan laporan keuangan.

Permasalahan diatas didasari oleh pengamatan langsung di Bidang Keuangan Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus, yakni pada pencatatan, pengerjaan dan penginputan laporan keuangan tahun 2021 yang menggunakan sistem SIMDA. Meskipun sudah dibantu dengan SIMDA Keuangan, namun bidang keuangan terlambat menyajikan laporan keuangan 2021 sampai bulan juni 2022. Seperti pernyataan Kepala Bidang Keuangan Ibu Diyah Winarni mengatakan “laporan keuangan tahun 2021 sampai sekarang (Juni 2022) belum siap sednagkan batas penyajian laporan tahunan paling lambat adalah setiap 31 Maret”. Keterlambatan penyajian laporan keuangan tahunan disebabkan oleh pengguna SIMDA Keuangan yaitu para staff akuntansi Bidang Keuangan kurang maksimal dalam menggunakannya. Karena laporan keuangan tersebut mengacu pada transaksi ynag diinput oleh Bidang Keuangan, hal ini diperkuat oleh pernyataan Bendahara Bidang Akuntansi Ibu Nur Fauziah “laporan keuangan tersebut berasal dari hasil penginputan transaksi yang masih terdapat banyak kesalahan yang harus ditelusuri letak permasalahnnya, bidang keuangan pun sendiri tidak tahu bagaimana bisa terjadi selisih, jadi harus diperbaiki Kembali agar siap diserahkan BPPKAD Kabupaten Kudus”.

Dari pernyataan tersebut menunjukkan persamasalahan tersebut berasal dari penggunaan SIMDA Keuangan yang kurang maksimal. Seperti pendapat (Mulyani

& Kurniadi, 2015) menyatakan suatu teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif apabila anggota dalam organisasi tersebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan teknologi secara baik. Teknologi akan berjalan dengan baik atau tidak akan tergantung pada kemampuan dan perilaku dari pengguna teknologi informasi tersebut. Begitu juga dengan sistem SIMDA Keuangan akan bermanfaat secara efektif jika penggunanya memiliki kemampuan dan keahlian, sebaliknya sistem SIMDA Keuangan tidak dapat berjalan dengan baik jika penggunanya menolak dan tidak mau menggunakan. Standar Akuntansi Pemerintah juga harus diterapkan disamping adanya sistem yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Hal ini perlu adanya pembaharuan bagi instansi terkait dan tentunya dari pemerintah pusat. Apabila permasalahan yang terjadi tidak diselesaikan dengan baik, maka akan ada kemungkinan permasalahan menjadi bertambah dan mempengaruhi keseluruhan sistem operasional suatu instansi. Sehingga dibutuhkan adanya solusi yang tepat dalam permasalahan yang dihadapi. Pembahasan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Purbanda *et al.* (2022). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada sampel yang digunakan, dalam penelitian ini sampelnya adalah seluruh staf akuntansi pengguna SIMDA Keuangan di Bidang Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah di Bidang Keuangan Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus”**.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan kegiatan magang yang dilakukan merupakan proses pembelajaran secara praktik di kantor Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari pembelajaran tersebut menemukan topik Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan yang terjadi di kantor dinas PUPR Kabupaten Kudus. Dari topik tersebut melakukan pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui penerapan SIMDA Keuangan Daerah dapat mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, dan cakupan Analisa kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

1.3 Sistematika Laporan Magang

Penyusunan laporan magang MB-KM ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang masing-masing menjelaskan hal yang berbeda. Adapun sistematika laporan sebagai berikut :

1.1.1 BAB 1 Pendahuluan

Menjelaskan secara umum gambaran magang yang dilakukan permasalahan, maksud dan tujuan magang serta menjelaskan mengenai sistematika penyusunan laporan magang.

a. Latar Belakang

Menguraikan alasan dari pemilihan topik yang ditentukan berdasarkan masalah yang ditemukan disertai dengan proses magang yang dilakukan.

b. Tujuan Magang

Menjelaskan maksud dan hal hal yang akan diuraikan dalam bab analisis.

c. Sistematika Laporan Magang

Menguraikan bab dan sub bab yang terdapat dalam laporan magang.

1.1.2 BAB 2 Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

Menguraikan profil organisasi/ instansi tempat magang (apabila diijinkan) dan menjelaskan kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan magang.

a. Profil Organisasi

Apabila diijinkan oleh perusahaan/ instansi maka akan dimasukkan sub bab profil organisasi tempat magang dengan menguraikan profil organisasi/instansi yang menjadi konteks yang dipilih

i. Struktur organisasi

Menggambarkan struktur organisasi tempat magang

ii. Gambaran umum organisasi

Menggambarkan dan mengenalkan organisasi tempat magang

iii. Visi dan misi organisasi

Menyebutkan visi dan misi organisasi tempat magang

b. Aktivitas Magang

Menguraikan seluruh aktivitas yang dilakukan selama magang

1.1.3 BAB 3 Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah yang muncul dan memilih beberapa masalah yang paling untuk dipecahkan

1.1.4 BAB 4 Kajian Pustaka

Menguraikan teori yang dapat digunakan untuk membahas masalah penting yang dipilih

1.1.5 BAB 5 Metode Penelitian

Menguraikan metode penelitian yang digunakan

1.1.5 BAB 6 Analisis dan Pembahasan

Menguraikan kembali masalah penting yang menjadi topik pembahasan

1.1.7 BAB 7 Kesimpulan dan Rekomendasi

Menjelaskan kesimpulan yang dihasilkan dari analisis permasalahan yang ada. Serta memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki organisasi tempat magang terhadap permasalahan yang ada dan program studi terhadap kelemahan kontribusi mahasiswa saat magang.

a. Kesimpulan

Menyimpulkan pendapat tentang masalah yang dianalisis

b. Rekomendasi

Rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki perusahaan

1.1.8 BAB 8 Refleksi Diri

Memberikan jabaran tentang hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat terhadap pekerjaan selama magang.



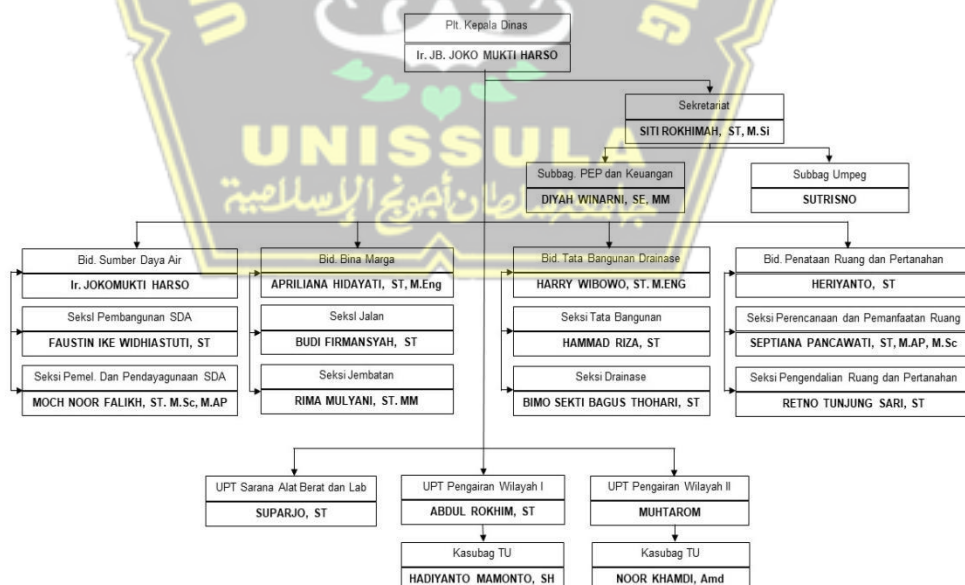
BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus merupakan sebuah instansi yang melayani segala pekerjaan terkait penataan ruang seperti perizinan suatu pembangunan gedung, jembatan, dan jalan, pembangunan drainase, penataan bidang dan juga pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan. Tidak hanya pembangunan gedung dan lain sebagainya, Dinas PUPR Kabupaten Kudus juga mengelola pengairan yang ada di Kabupaten Kudus, mulai dari irigasi, pintu air, pembersihan hingga penanganan kali atau sungai dangkal.

2.1.1 Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kudus

Sumber : Dinas PUPR Kab.Kudus, 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus **mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata Bangunan dan Drainase dan Penataan Ruang dan Pertanahan** berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata Bangunan dan Drainase Serta Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata Bangunan dan Drainase Serta Penataan Ruang dan Pertanahan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata Bangunan dan Drainase Serta Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan jembatan, pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya air, Tata Bangunan dan Drainase Serta Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, Sumber Daya Air, Tata Bangunan dan Drainase Serta Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Praktik manajemen dan akuntansi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus di Bidang Kesekretariatan cukup bagus, karena pada dasarnya semua konsep mulai dari pelayanan, hingga pekerjaan praktik akuntansi sudah berjalan sesuai sistem dari pusat. Dinas PUPR Kabupaten Kudus sendiri menggunakan SIMDA Keuangan dalam penghitungan akuntansi. Hal ini yang menjadi pusat perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan metode observasi selama 5 bulan. Untuk merealisasikan efisiensi serta kemudahan pelayanan, Dinas PUPR Kabupaten Kudus menerapkan layanan secara terbuka yang dapat dilakukan oleh instansi atau masyarakat melalui sistem yang tersedia.

2.1.3 Visi dan Misi Organisasi

a. Visi Organisasi

Terwujudnya infrastruktur yang mantap

b. Misi Organisasi

1. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana kerja yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang profesional
2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur Bidang Bina Marga, dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa
3. Memenuhi kebutuhan infrastruktur sumber daya air, termasuk mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan jaringan irigasi serta pengembangan jaringan irigasi serta mengamankan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air

2.1.4 Sistem Laporan Keuangan Dinas PUPR

Pelaporan laporan keuangan pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA). Aplikasi ini membantu para karyawan khususnya bidang keuangan dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan. SIMDA Keuangan merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. sebuah sistem yang Laporan keuangan diinput dan disajikan melalui SIMDA Keuangan yang sudah tersistem dari pusat. Namun terdapat beberapa

kekurangan dalam pengerjaan laporan keuangan pada aplikasi ini, salah satunya kurang optimalnya kinerja aplikasi sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pelayanan eksternal terhadap masyarakat berupa keterbukaan dalam pengelolaan laporan keuangan, sasaran kinerja pegawai dan lain sebagainya dimana dalam hal ini membutuhkan kualitas pelayanan bermutu dan pengelolaan keuangan yang baik sebagai tujuan tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik di tingkat daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berupa Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah. Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pengelolaan laporan keuangan di aplikasi SIMDA Keuangan adalah menyusun proses dan standar pelayanan public. Dalam penyusunan tersebut melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pemberian informasi kepada masing-masing fungsi bagian di Bidang Keuangan dan Kesekretariatan akan diadakannya penyusunan proses dan standar pelayanan dalam pengelolaan laporan keuangan sehingga masing-masing fungsi bagian dapat mempersiapkan data-data yang dibutuhkan
2. Pengumpulan data berupa catatan keluar masuknya kas dan mekanisme serta data pendukung lainnya dalam penyusunan proses dan standar pelayanan pengelolaan laporan keuangan
3. Data yang dikumpulkan dihitung dan dikumpulkan dihimpun ke dalam google spreadsheet disusun dalam masing-masing fungsi bagian

4. Penyusunan data dari masing-masing fungsi berdasarkan aktivitas keluar masuknya kas
5. Penginputan data dalam aplikasi SIMDA Keuangan ke dalam masing-masing penjelasan laporan keuangan, belanja daerah, penjelasan pos-pos neraca, piutang, persediaan, asset tetap, asset lainnya, hutang beban, laporan operasional, beban, hingga perubahan ekuitas
6. Pengecekan oleh masing-masing fungsi sebagai proses evaluasi awal sebelum melakukan standar pelayanan publik
7. Perbaikan evaluasi dari karyawan serta perbaikan-perbaikan dari masing-masing fungsi sebelum dilakukannya perekapan laporan keuangan per tahun
8. Penetapan standar pelayanan dan pengelolaan laporan keuangan kantor kepada dinas kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi

2.2 Aktivitas Magang

2.2.1. Deskripsi Kegiatan Magang

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan magang di Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus :

- i. Masuk pukul 07.00 Work From Office
- ii. Istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB
- iii. Pulang pada pukul 15.15 WIB

Tabel 2. 1 Jam Kerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin - Kamis	07.00-12.00 WIB (masuk) 12.00-13.00 WIB (istirahat) 13.00-15.15 WIB (masuk) 15.15-..... WIB (pulang)
Jumat	06.30-08.00 WIB (olahraga) 08.00-11.15 WIB (masuk) 11.15-..... WIB (pulang)

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang di Dinas PUPR Kudus

- i. Kegiatan magang dimulai pada pukul 07.00 WIB secara WFO. Pada hari Senin diawali dengan pengenalan jobdesk di bidang Kesekretariatan dan TBD serta memperkenalkan diri ke Bapak / Ibu ASN dan tenaga kerja staff di Dinas PUPR Kabupaten Kudus.
- ii. Dalam satu bulan pertama saya mendapatkan tugas yang beragam mengenai tugas-tugas yang ditangani oleh bidang kesekretariatan . Seperti halnya menghitung dan menginput laporan keuangan pengeluaran kas, hingga laporan operasional tahun 2021.
- iii. Bulan kedua pekerjaan masih berlanjut menyelesaikan tugas bulan pertama, dan pekerjaan semakin bertambah, seperti halnya Pendataan Surat Keluar Masuk Dinas, menginput data pribadi dan tugas fungsional ASN dan staff karyawan tahun 2021. Hal ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi saya karena

melatih keterampilan serta menambah pengetahuan saya dalam berbagai aspek yang saya dapat selama bulan kedua.

- iv. Bulan ketiga saya terlibat di bagian surat menyurat, mengarsip dan menginput surat keluar masuk dinas selama tahun 2021 ke dalam sistem. Hal ini menambah pengetahuan saya mengenai bagaimana cara untuk manajemen dalam penyusunan dan penginputan surat standar pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan di Jawa Tengah.
- v. Setiap bulan termasuk bulan keempat dan lima saya melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin seperti bulan sebelumnya seperti validasi absensi sebagai tunjangan kinerja, validasi daftar hadir PNS, dan lain sebagainya. Bulan keempat saya terlibat dalam perekapan arsip surat yang sudah diinput ke sistem, yang mana menambah pengetahuan saya bagaimana proses penyusunan serta mempelajari proses pelayanan publik yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Pengalaman magang di Dinas PUPR Kabupaten Kudus menjadikan pengetahuan yang sangat berharga bagi saya. Dimulai dengan penambahan keterampilan *soft skill*, hingga mempelajari manajemen dan pengelolaan *sistem laporan akuntansi* yang sebelumnya belum saya dapatkan secara praktik di dunia kerja. Hal ini menjadikan saya lebih berkembang serta mampu menerapkan ilmu-ilmu selama masa perkuliahan sekaligus mendapatkan ilmu baru.

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pengelolaan suatu lembaga, permasalahan merupakan suatu hal yang tak bisa untuk dihindari oleh siapapun. Namun keberadaannya mampu menjadikan evaluasi yang berguna sebagai pengelolaan lebih baik di kemudian hari. Permasalahan tersebut dapat muncul di berbagai aspek maupun aktivitas kegiatan yang dijalankan oleh suatu lembaga. Tidak menutup kemungkinan di dalam instansi pemerintah yang sudah profesional pun tidak dapat menghindari sebuah permasalahan. Dalam hal ini penulis memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan hasil survey yang didapat dalam tema sistem laporan akuntansi di bidang Kesekretariatan Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

Penulis melakukan identifikasi permasalahan di bidang Kesekretariatan khususnya bagian Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus karena bidang Kesekretariatan merupakan sebuah fungsi yang melayani keuangan hingga fungsi-fungsi lain sebagai jasa pelayanan. Alasan lain mengidentifikasi permasalahan di dalam Sistem Laporan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus adalah terdapat adanya beberapa urgensi permasalahan di dalam pelayanan yang mempengaruhi kepuasan fungsi-fungsi lain untuk diberikan solusi yang berlandaskan teori.

3.1 Evaluasi Penerapan SIMDA Keuangan

Data Hasil Kuesioner Penerapan SIMDA Keuangan di Dinas PUPR Kab.

Kudus bagi karyawan

Tabel 3. 1 Data Hasil Kuesioner Penerapan SIMDA Keuangan

Nomor	Permasalahan
1.	Kualitas pemahaman masing-masing karyawan terkait mendetail fungsi aplikasi SIMDA Keuangan
2.	Kepuasan masing-masing karyawan dalam menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yang disebabkan oleh jaringan dan pengembangan aplikasi yang masih kurang
3.	Pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2022

Adapun permasalahan yang didapatkan dalam survey mengenai penerapan SIMDA Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan yang menjadi sasaran pelayanan dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan dan standar pelayanan publik, permasalahan tersebut sebagai berikut :

- 2) Pemahaman yang masih abstrak dari anggota/karyawan masing-masing fungsi pada saat proses pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berlangsung.

Pemahaman mengenai definisi proses penyusunan laporan keuangan dalam aplikasi SIMDA Keuangan yang belum sepenuhnya dipahami oleh anggota/karyawan masing-masing fungsi merupakan sebuah permasalahan yang perlu adanya solusi terkait penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan. Mengingat pemahaman dasar ini penting sekali untuk didapatkan oleh anggota/karyawan karena tanpa adanya pemahaman yang jelas serta mendalam, penyusunan laporan

keuangan akan sangat terhalang dan tidak mampu dilaksanakan dengan baik walaupun aplikasi ini sudah menggunakan sistem dari pusat. Aspek ini tergolong dalam aspek service quality dalam variable reability yang membahas mengenai kapabilitas pelayanan untuk mampu memberikan kepuasan kepada konsumen, akan tetapi belum optimal dalam permasalahan yang saya temukan serta membutuhkan solusi agar permasalahan ini dapat teratasi dengan baik.

Urgensi dalam permasalahan ini merupakan suatu hal yang bersifat kurang optimalnya kualitas pelayanan dalam kategori pemahaman penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan, sehingga apabila di kemudian hari tidak diperbaiki maka akan menimbulkan permasalahan lain yang lebih kompleks. Dalam kasus ini diharapkan ingin mengoptimalkan kualitas pelayanan kategori pemahaman karyawan dalam penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan berdasarkan teori-teori.

- 3) Kepuasan masing-masing karyawan dalam menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yang disebabkan oleh jaringan dan pengembangan aplikasi yang masih kurang.

Kepuasan karyawan dalam menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan merupakan salah satu bentuk kualitas pelayanan dalam kategori pemberian pelayanan. Hal ini mampu memberikan Batasan-batasan waktu pengerjaan proses penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu. Namun dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh bidang keuangan dan kesekretariatan dinas PUPR Kabupaten Kudus belum memberikan batas waktu secara jelas sebelum berlangsungnya penginputan ke sistem. Hal ini menjadikan ketika penginputan berlangsung terjadi banyak kekuarangan data yang seharusnya

sudah terkumpul dan siap untuk dijadikan bahan penyusunan serta evaluasi langsung dari narasumber.

Permasalahan ini dapat menimbulkan kondisi yang tidak ideal serta bersifat berbahaya bagi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, mengingat pada saat penginputan seharusnya seluruh data sudah terkumpul dengan baik serta lengkap untuk mencapai kondisi yang ideal.

4) Pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

Dalam kolektifitas data secara mendetail menjadi bagian penting untuk menggali lebih dalam mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh masing-masing fungsi dalam menjalankan pengerjaan laporan keuangan. Suatu sistem sangat berpengaruh terhadap mekanisme yang dijalankan. Sama halnya dengan SIMDA Keuangan, keberhasilan sistem bisa sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dijalankan. Namun SIMDA Keuangan ini belum efektif karena pengembangan aplikasi yang kurang dan Teknik pengumpulan data yang kurang mendetail serta komprehensif.

Mekanisme kolektivitas melalui Microsoft word ini sudah selayaknya harus segera diubah menggunakan metode yang lain agar lebih detail dalam pengelompokan. Mengingat data proses penyusunan laporan keuangan merupakan produk hasil yang akhirnya akan diinput ke dalam sistem pusat. Tentu hal tersebut harus mencakup hingga bagian-bagian detail mekanisme yang dilakukan oleh masing-masing fungsi.

Permasalahan lainnya terkait penerapan SIMDA Keuangan di Dinas PUPR Kabupaten Kudus yaitu proses pencatatan yang diakibatkan oleh sistem yang tidak terintegrasi dengan baik dan permasalahan server database yang ada di instansi ini. Apabila dilihat dari kendala ketidak efektifan pengelolaan laporan keuangan di Dinas PUPR Kabupaten Kudus dapat dikategorikan sebagai gab antara spesifikasi kualitas sarana prasarana dalam mencatat laporan keuangan dan kualitas jasa. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya penggunaan sarana prasarana yang lebih modern atau ketidakmampuan perusahaan atau instansi dalam memenuhi kualitas standar operasional. Urgensi dalam masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan SIMDA Keuangan dalam pencatatan dan penghitungan laporan keuangan di Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

3.2 Analisa kualitas laporan keuangan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus

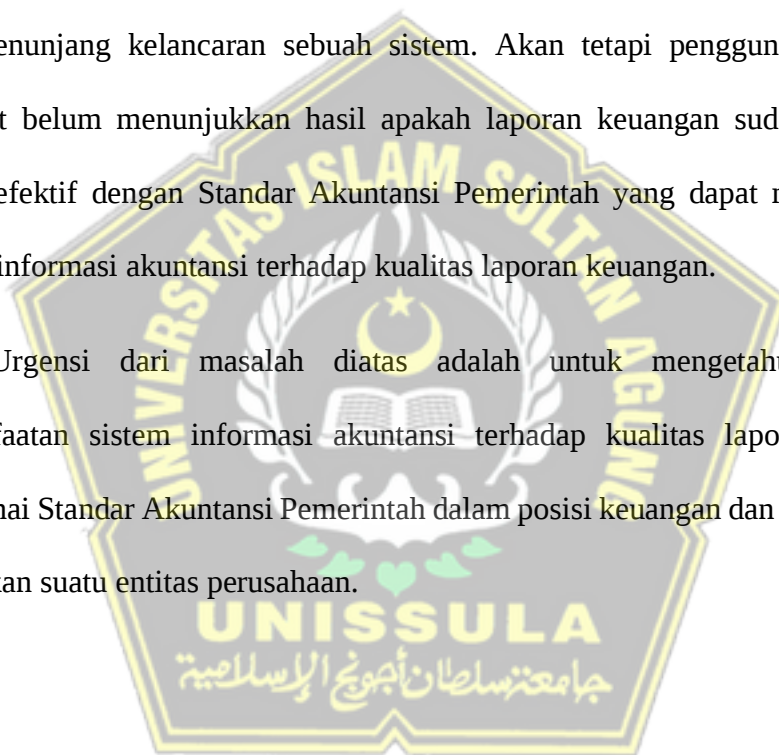
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip - prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang disusun dnegan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Komang et al., 2021)

Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan demikian, SAP

merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus, sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat dioperasikan tanpa menggunakan komputer, keterlibatan komputer dalam menangani tugas - tugas manusia dalam suatu sistem, lebih khusus dalam pencatatan dan penghitungan laporan keuangan memiliki peran yang sangat besar dan menunjang kelancaran sebuah sistem. Akan tetapi penggunaan komputer tersebut belum menunjukkan hasil apakah laporan keuangan sudah sesuai dan sudah efektif dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang dapat mempengaruhi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Urgensi dari masalah diatas adalah untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah dalam posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan suatu entitas perusahaan.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah

Evaluasi (Formal Evaluation)

Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) sesuai yang dikemukakan (Dunn, 2003) yaitu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat serta dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijaksanaan yang telah diumumkan oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah tujuan dan manfaat program disampaikan secara formal untuk mengukur ketepatan dan manfaat sebuah program. Dari segi metode, evaluasi program menggunakan undang-undang dokumen program, dan wawancara sebagai pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan lebih spesifik tujuan serta target kebijakan.

Evaluasi sistem merupakan suatu perilaku atau usaha untuk mengetahui kondisi sebenarnya suatu penyelenggaraan sistem informasi. Evaluasi SIMDA Keuangan dilakukan untuk mengetahui atau menilai keefektifan dari penggunaan program yang digunakan untuk mengerjakan, menginput hingga menyajikan laporan keuangan, hingga akhirnya dalam evaluasi ini dapat dilihat apakah penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dapat mempengaruhi kualitas laporan

keuangan dan dipersiapkan tindakan lebih lanjut atau evaluasi yang dapat direncanakan untuk memperbaiki kinerja dalam penerapan dan pengelolaan hingga penyajian laporan keuangan.

Evaluasi adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk yang bersifat kualitatif (Arikunto, 2021).

Evaluasi sebagai suatu proses untuk memastikan sejauh mana terealisasi atau tidaknya suatu tujuan (Joyce & Weil, 2003).

Para ahli telah menjelaskan teori dan konsep berkenaan dengan evaluasi dari berbagai perspektif serta cara pandang para ahli itu sendiri. Perbedaan sudut pandang, konsep, kekhasan, dan metodologi yang dimiliki tentunya menjadi latar belakangnya.

Evaluasi program adalah proses penggambaran, menghimpun, dan penyajian fakta atau data kepada penarik kesimpulan, yang selanjutnya akan diaplikasikan sebagai pertimbangan terhadap program tersebut, perlukah dibenahi, disudahi ataupun diteruskan (Muryadi & Universitas, 2017).

Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut (Akbar & Mohi, 2018)

Pakar ahli (Dunn, 2003) mengungkapkan secara lebih terperinci menjelaskan tujuan dari evaluasi yakni untuk mengukur program terhadap pengaruh ke masyarakat, menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan standar, mengidentifikasi program mana yang tidak jalan, dan apakah program sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah atau undang-undang.

Sistem Informasi Manajemen

Menurut (Nuruddin, 2022) Sistem informasi Manajemen (SIM) adalah sistem perencanaan dalam pengendalian internal suatu bisnis yang mencakup penggunaan akuntansi manajemen atas manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Menurut Moeljodihardjo dalam (Agustiandra & Sabandi, 2019) Sistem Informasi Manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan.

Menurut (Stoner, 1996) Sistem informasi Manajemen adalah sebuah metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi – fungsi dari manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Menurut (Agustiandra & Sabandi, 2019) Mc.Leod mengungkapkan Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer ang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa.

Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berpendapat Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri

dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah untuk menilai hasil dari laporan keuangan yang dihasilkan. Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para pengguna (Pratama, 2017). Adanya SIMDA akan membantu kinerja dalam pengelolaan laporan keuangan yang lebih terpadu dan terstruktur, karena SIMDA berupa program yang dirancang khusus untuk pengelolaan informasi manajemen khususnya keuangan dalam pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (<http://www.bpkp.go.id/>) adalah :

- a) Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA
 - b) Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
 - c) Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
 - d) Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governemen; dan
 - e) Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.
- Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (<http://www.bpkp.go.id/>) adalah sebagai berikut:

- a) Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
 - b) Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
 - c) Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
- Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku
 - Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

Klasifikasi (SIMDA) dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (<http://www.bpkp.go.id/>) yaitu:

- a) Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
- b) Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
- c) Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/lembaga.

Unsur Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (<http://www.bpkp.go.id/>) yaitu :

- a) Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
- b) Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan

pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;

- c) Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
- d) Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, transaksi, dan penyaluran informasi.

Keluaran yang dihasilkan SIMDA Keuangan :

1. Bidang Penganggaran, yaitu :
 - a) Rencana kerja anggaran (RKA)
 - b) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
 - c) Surat penyediaan dana (SPD)
2. Bidang Penatausahaan, yaitu :
 - a) Surat permintaan pembayaran (SPP)
 - b) Surat perintah membayar (SPM)
 - c) Surat perintah pencairan dana (SP2D)
 - d) Surat tanda setoran (STS)
 - e) Register
 - f) Surat pengendalian lainnya
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, yaitu :
 - a) Jurnal
 - b) Buku besar

- c) Buku pembantu
- d) Laporan Realisasi Anggaran
- e) Laporan Arus Kas
- f) Neraca

Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan

Beberapa fungsi pengimplementasian SIMDA Keuangan sebagai berikut :

- a. Membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah baik dalam pelaksanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban
- b. Menyusun laporan keuangan yang lebih efisien
- c. Menyajikan beberapa informasi yang akurat secara efektif dan efisien
- d. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya
- e. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan mengubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit

Keberhasilan dari SIMDA Keuangan sesuai dengan teori yang dikemukakan (John P. Campbell, Richard J, Campbell, 1988) bahwa keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kualitas program tersebut, apakah sudah berjalan dengan maksimal atau belum. Keberhasilan sasaran dari penerapan SIMDA Keuangan ini menurut teori yang dikemukakan (John P. Campbell, Richard J, Campbell, 1988) bahwa keberhasilan penerapan suatu program dapat dilihat dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap output yang dihasilkan program tersebut, artinya keberhasilan sasaran dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat kualitas output yang dihasilkan dari program atau sistem yang digunakan organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

4.2 Kesesuaian Output SIMDA Keuangan dengan

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi keuangan daerah diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu mengatur Standar Akuntansi Pemerintah daerah agar dapat digunakan secara seragam di seluruh pemerintah daerah. (Prof. Erlina, Drs. Rasdianto, 2020)

Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan (PP NO. 71 SAP, 2010) yaitu “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis akrual, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual”.

Menurut (Maria Suryaningsih, 2020) Penerapan akuntansi berbasis akrual adalah penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurut (Yanti et al., 2020) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Standar Akuntansi Pemerintah juga berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak luar instansi.

Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut (Indra, 2010) Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu meningkatkan akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah diberlakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Indikator Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Indikator Standar Akuntansi Pemerintah menurut Maria Suryaningsih (2020) mengungkapkan kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi apabila akuntansi berbasis akrual dan teknologi informasi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat mengungkapkan transaksi keuangan yang dibuktikan dengan sumber dokumen kemudian dicatat kedalam akun dalam bentuk jurnal yang selanjutnya jurnal tersebut dipindah bukukan ke dalam buku besar (BPK Republik Indonesia, 2016)

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Menurut (Suteja, 2018) “laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan”. Dalam sudut proses kegiatan, pencatatan dan penggolongan

bersifat rutin yang dilakukan dengan metode manual atau tulis tangan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan atau instansi, dan bisa juga dilakukan dengan metode digital, atau dilakukan dengan menggunakan aplikasi dari komputer.

Menurut (PP NO. 71 SAP, 2010) menyatakan guna memperoleh informasi keuangan yang bermanfaat untuk penggunaannya, informasi yang ada dalam laporan keuangan harus berkualitas serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang (Putri, 2022).

Menurut (Erviana, 2017) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah prestasi yang dicapai pemerintah daerah yang mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan memperoleh penilaian berupa pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK menyerahkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan, berarti suatu organisasi tersebut telah menyajikan dan mengungkapkan informasi keuangan secara wajar dan berkualitas.

Sedangkan menurut (Yanti et al., 2020) Kualitas Laporan Keuangan merupakan kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan memndasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan daerah menurut Badan Pengawas Keuangan (2020) dipengaruhi oleh kegiatan pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah.. Kegiatan pengendalian yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Erviana, 2017). Pernyataan dari *Framework Internal Control (COSO)* mengungkapkan pengendalian intern merupakan proses yang dilakukan manajemen dan personal entitas lain. Proses tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam operasi, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan menjamin manajemen mematuhi hukum aturan yang berlaku.

Sedangkan menurut (Yanti et al., 2020) Kualitas Laporan Keuangan merupakan kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan berdasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.



BAB V

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian kualitatif ini sesuai dengan fakta di lapangan.

5.2 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data menggunakan teknik penyebaran kuesioner, wawancara, dan data dokumen sebagai pendukung dalam penelitian. Dengan kata lain peneliti mengambil data sendiri di lapangan yang tampak dalam penerapan SIMDA Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah pada Bidang Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

5.3 Subjek dan Objek Lapangan

Subjek dalam penelitian ini adalah informasi dari orang yang memberikan informasi terkait masalah yang dihadapi oleh instansi yang merupakan Supervisor pendamping dan Staff/Karyawan Bidang Keuangan. Obyek penelitian yaitu di Bidang Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Untuk waktu penelitian, peneliti menetapkan waktu penelitian selama 4.5 bulan, yakni mulai bulan Februari – Juni 2022 dan kuesioner beserta wawancara selama 2 bulan, yakni mulai bulan November – Desember 2022.

5.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam pembuatan laporan kegiatan magang ini berupa observasi dan wawancara yang dibuat sendiri oleh peneliti. Informan dalam penelitian adalah Staff Bidang Keuangan. Kuesioner didistribusikan ke masing-masing pegawai yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dalam daftar pertanyaan yang diisi responden mengenai penerapan SIMDA pertanyaan mengenai kualitas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

5.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis naratif deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode mengkaji dan menganalisis data secara objektif sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan (Purnamasari et al., 2020). Analisis yang dikumpulkan melalui pengumpulan dokumen dan wawancara dari pengguna SIMDA Keuangan dan membahas mengenai bagaimana penerapan SIMDA Keuangan dan SAP di Bidang Keuangan.



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Analisis Hasil Pengamatan

Pada bab ini menelusuri beberapa hal untuk memecahkan masalah dalam laporan magang dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan kata lisan yang dicermati oleh peneliti. Informan dalam penelitian adalah staff bidang keuangan yang menggunakan SIMDA Keuangan. Untuk memecahkan masalah menggunakan metode ini sumber data yang didapatkan melalui proses wawancara, observasi dan mengumpulkan data pendukung. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer karena didapatkan melalui wawancara dengan beberapa karyawan yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dan pimpinan Bidang Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus, serta adanya observasi langsung di lapangan yang dilakukan selama proses magang berlangsung. Sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti jurnal-jurnal akuntansi dan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

Pengamatan pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus, penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dalam mengelola keuangan baru satu tahun, dikarenakan sebelumnya menggunakan web dalam pengelolaan tersebut, dan terdapat pembaharuan pada aplikasi SIMDA Keuangan. Dalam melakukan proses

pencatatan hingga pengelolaan keuangan tersebut Dinas PUPR Kabupaten Kudus berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Sehingga semua proses pengelolaan keuangan dalam kantor dinas/pemerintah harus sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam hal penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, beberapa karyawan mengalami kendala dalam menerapkannya, hal ini terjadi karena faktor internal perusahaan/kantor dinas. Dimana beberapa karyawan yang mengelola keuangan kurang memahami regulasi dari peraturan tersebut dan penggunaan aplikasi yang tidak tentu kapan akan terjadi pembaharuan, sehingga dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan membutuhkan waktu untuk memahaminya. Dalam aplikasi SIMDA Keuangan identik dengan sistemnya yang mempermudah penggunaanya dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi selama penulis melakukan magang di kantor Dinas PUPR Kabupaten Kudus bagian Keuangan dan Kesekretariatan, penulis menemukan ketidaktepatan dalam penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan.

Pengamatan terhadap identifikasi masalah di Dinas PUPR Kabupaten Kudus bidang Keuangan merupakan sebuah bidang yang melayani dalam pencatatan hingga pengelolaan keuangan. Alasan lain mengidentifikasi permasalahan di dalam bidang Keuangan adalah terdapat adanya beberapa urgensi permasalahan di dalam penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan bagi beberapa karyawan di bidang Keuangan yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan berlandaskan teori.

6.2 Hasil dan Pembahasan

Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara kepada informan yaitu karyawan dan staff administrasi keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Data wawancara diperoleh sebanyak 7 informan karyawan Bidang Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

Karakteristik Informan

a) Data Nama Informan

Tabel 6. 1 Data Nama Informan

No	Nama
1.	Diyah Winarni, S.E., M.M.
2.	Nur Fauziah, S.E
3.	Nur Ikhwan, S.E
4.	Suhartatik, S.E
5.	Mega Febriana, S.E
6.	Cintya, S.E
7.	Fara, A.Md A.K

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Pada data nama informan terdapat 7 informan pengguna SIMDA Keuangan di Bidang Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus

b) Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

Tabel 6. 2 Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	1
2	Perempuan	6
	Jumlah	7

Sumber : Data primer diolah, 2022

Pada karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin perempuan

c) Karakteristik informan berdasarkan umur informan

Tabel 6. 3 Karakteristik informan berdasarkan umur informan

No	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (orang)
1	<25	1
2	26 – 35	1
3	36 – 45	4
4	46 – 55	1
	Jumlah	7

Sumber : Data primer diolah, 2022

Pada karakteristik informan berdasarkan umur, didominasi oleh informan berumur 36 – 45 tahun

d) Karakteristik informan berdasarkan Pendidikan terakhir informan

Tabel 6. 4 Karakteristik informan berdasarkan Pendidikan terakhir informan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SMA/K	0
2	D3	1
3	S1	5
4	S2	1
5	S3	0
	Jumlah	7

Sumber : Data primer diolah, 2022

Pada karakteristik informan berdasarkan Pendidikan terakhir, didominasi oleh informan dengan Pendidikan terakhir S1 ekonomi

e) Karakteristik informan berdasarkan jabatan pekerjaan informan

Tabel 6. 5 Karakteristik informan berdasarkan jabatan pekerjaan informan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Bidang Keuangan	1
2	Bendahara Kantor	1
3	Staff/Karyawan	5
	Jumlah	7

Sumber : Data primer diolah, 2022

Pada karakteristik informan berdasarkan jabatan pekerjaan, didominasi oleh informan dengan jabatan Staff/Karyawan

6.2.1 Evaluasi Penerapan SIMDA Keuangan

1. Pemahaman Masing-masing Pegawai tentang SIMDA Keuangan

Permasalahan yang terdapat pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus ialah kurangnya pemahaman masing-masing pegawai tentang SIMDA Keuangan mengenai proses bisnis dan standar pelayanan publik, tidak adanya batas waktu penyusunan proses bisnis dan pengumpulan data yang kurang efektif membuat kualitas pelayanan menjadi tidak optimal. Adanya SIMDA Keuangan yang memberikan fasilitas dalam penyusunan proses laporan keuangan dan standar pelayanan publik membantu mengurangi kendala yang ada sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal. Karakteristik utama dari SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang sebagai proses pengolahan data keuangan pada Pemerintah Daerah. Secara umum pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus telah mengerti/memahami tentang tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan. Program aplikasi SIMDA Keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan manajemen dan keuangan daerah secara tersistem dan terintegrasi. Hal ini terbukti dari wawancara dengan informan :

- 1) Kepala Bidang Keungan, Ibu Diah Winarni beliau dengan tegas mengungkapkan *“SIMDA Keuangan itu adalah sebuah aplikasi komputer untuk mengelola dan mengolah transaksi keuangan daerah, aplikasi ini merupakan pembaharuan dari web yang sebelumnya serupa dengan SIMDA”*.

Pernyataan kepala bidang Keuangan dan Perbendaharaan di atas menunjukkan bahwa SIMDA Keuangan merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh para karyawan bidang keuangan untuk menginput serta mengolah data keuangan di Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Pendapat tersebut di atas telah sesuai dengan pengertian SIMDA Keuangan secara umum adalah sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah.

- 2) Dalam wawancara informan Staff Bidang Keuangan, Bapak Nur Ikhwan juga mengungkapkan *“SIMDA Keuangan belum mudah dipahami karena penerapan program yang masih baru, sehingga karyawan masih beradaptasi dalam membantu pengecekan data laporan keuangan”*.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan belum dipahami oleh beberapa staff dalam proses pengecekan data laporan keuangan.

- 3) Dalam wawancara salah satu pegawai pengguna aplikasi SIMDA Keuangan Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Ibu Nur Fauziah juga mengungkapkan *“SIMDA Keuangan belum menunjukkan dalam proses mempermudah penyajian Laporan Keuangan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga staff di bidang keuangan belajar secara otodidak”*.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beberapa pegawai pengguna aplikasi SIMDA Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus belum mengerti dan memahami manfaat SIMDA Keuangan.

4) Namun ketika ditanyakan kepada informan Staff di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Ibu Mega Febriana juga berpendapat yang serupa, beliau dalam wawancara mengungkapkan *“selain penerapan yang masih baru, namun aplikasi SIMDA Keuangan juga mempermudah proses ekspor dan import data antara SKPD dengan menggunakan flashdisk sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan anggaran yang tentunya khusus di bidang anggaran dan perbendaharaan yang membantu penyajian laporan pengendalian anggaran, akan tetapi penggunaan aplikasi ini masih sangat terbaru, sehingga beberapa karyawan yang menggunakan aplikasi tersebut masih dalam adaptasi karena adanya pembaharuan”*.

Pernyataan tersebut menunjukkan penggunaan SIMDA Keuangan meminimalisir terjadinya risiko kesalahan dalam penghitungan laporan keuangan, akan tetapi beberapa karyawan masih beradaptasi dengan SIMDA Keuangan karena adanya pembaharuan aplikasi SIMDA Keuangan.

5) Pada bidang Keuangan, salah seorang Staff Ibu Cintya mengungkapkan beberapa output yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan. Beliau mengungkapkan *“Di bidang akuntansi laporan keuangan yang diolah menggunakan SIMDA Keuangan untuk sekarang sudah ada 7 Laporan yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, semua itu diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi, itulah sama seperti di bidang*

lain, kami hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan mengawasi proses pengelolaannya sampai menghasilkan laporan yang kita inginkan”.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan menghasilkan tujuh laporan keuangan hingga proses pengelolaannya menghasilkan laporan yang diinginkan.

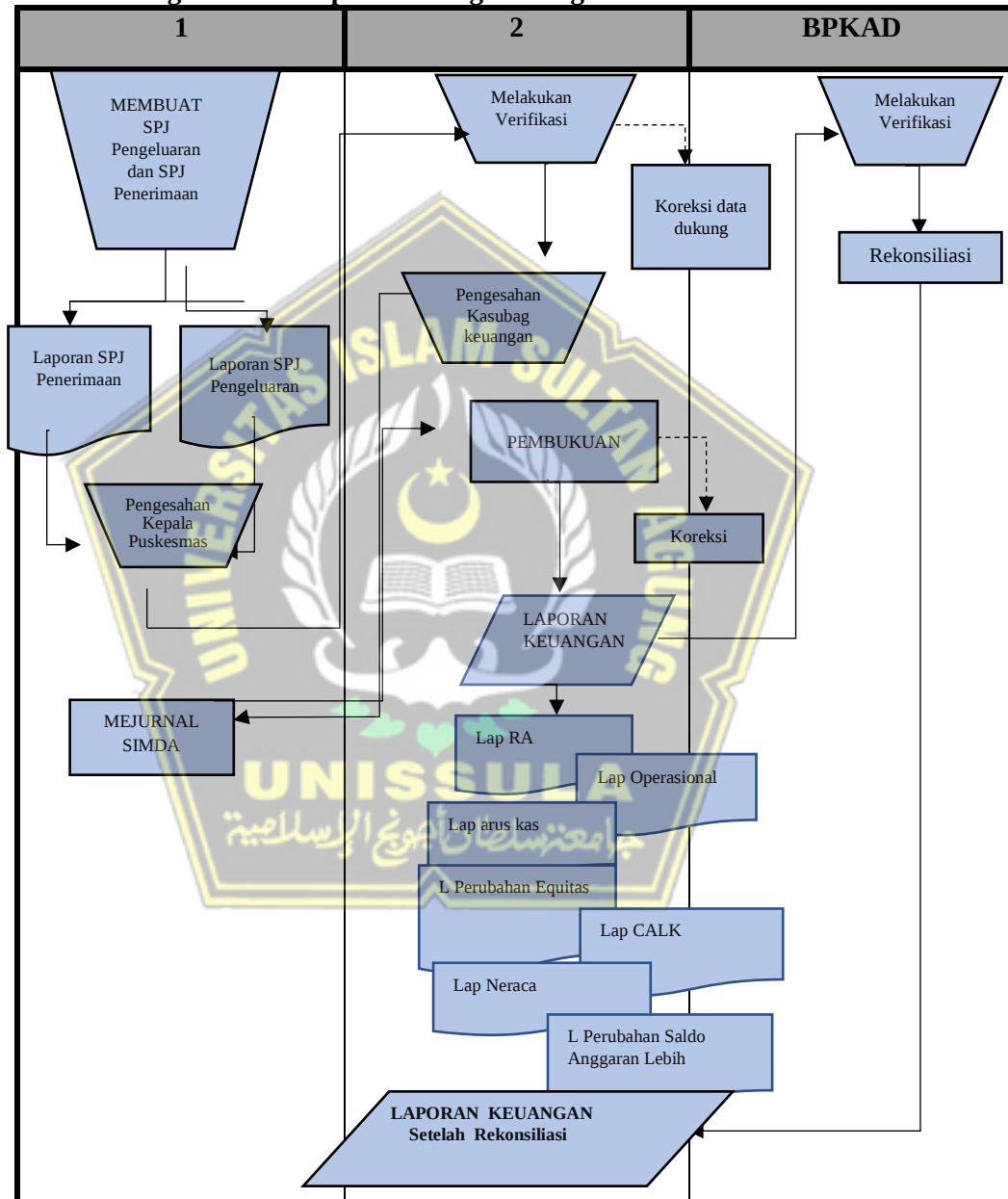
- 6) Salah satu karyawan Bidang Keuangan, Ibu Suhartatik justru mengungkapkan *“penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan belum maksimal, karena kurangnya pengembangan aplikasi secara penuh sehingga kinerja user dalam mengelola dan menginput data keuangan menjadi terhambat, selain itu juga adanya gangguan jaringan dan penerapan aplikasi simda masih tergolong baru”.*

Pernyataan diatas menunjukkan sisi yang berbeda dalam penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan, kurangnya pengembangan SIMDA Keuangan karena optimalisasi yang kurang sehingga pengelolaan laporan keuangan menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pemahaman pegawai terhadap SIMDA Keuangan belum optimal, hal ini disebabkan : 1) Penggunaan SIMDA Keuangan yang masih baru, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. 2) Kurangnya pengembangan aplikasi secara penuh sehingga kinerja pengguna dalam mengelola dan menginput data keuangan menjadi terhambat. 3) Jaringan yang belum stabil sehingga terjadi gangguan ketika menjalankan aplikasi.

Berikut ilustrasi gambar dari hasil wawancara yang peneliti gambarkan ke dalam sebuah flowchart sederhana yang berkaitan dengan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan

Gambar 6. 1 Pengolahan data pada Bidang Keuangan Dinas PUPR Kab.Kudus



Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

2. Kepuasan dalam Penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan

Kepuasan karyawan dapat dilihat salah satunya dari aspek bagaimana kenyamanan karyawan pada saat menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan. Hal tersebut dilakukan wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan bahwa proses pengelolaan keuangan sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan sangat terlihat perbedaannya, dimana ketika menggunakan Microsoft excel sering molor dalam waktu pengerjaan yang seharusnya, dan kesalahannya pun tidak terdeteksi karena pengelolaannya bersifat manual lalu menguploadnya ke web SIPD, namun penerapan SIMDA Keuangan yang masih baru juga mempengaruhi kinerja dan kualitas laporan keuangan sehingga kepuasan karyawan terhadap penggunaan SIMDA masih rendah. Hal tersebut menunjukkan penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dalam pengelolaan laporan keuangan belum memberikan dampak signifikan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan, Ibu Diah Winarni, proses pengelolaan keuangan sebelum dan sesudah digunakannya SIMDA Keuangan dapat dilihat di bawah ini :

a) Kepuasan Terhadap SIMDA Keuangan

Evaluasi terhadap penerapan SIMDA Keuangan yang sebelumnya menggunakan Microsoft excel dilakukan dengan membandingkan waktu standar dan waktu faktual pada setiap proses penyelesaian satu produk dari SIMDA Keuangan. Waktu standar merupakan waktu penyelesaian output standar

berdasarkan peraturan yang telah diatur pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 (2007) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan waktu faktual merupakan waktu penyelesaian output rata-rata yang dihasilkan dalam penerapan SIMDA Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan dan Kesekretariatan, Ibu Diyah Winarni berikut dapat dilihat perbandingan penyelesaian waktu standar dan waktu faktual setelah penggunaan SIMDA :

Tabel 6. 6 Perbandingan penyelesaian waktu standar dan waktu faktual

No	Bidang Output	Waktu Penyelesaian Dengan Ms. Exxcel	Waktu Penyelesaian Dengan SIMDA
1	Bidang Penganggaran	5 hari	3 hari
2	Bidang Penatausahaan	2 hari	1 hari
3	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	9 bulan	6 bulan

Sumber : (Permendagri No 59, 2007) dan Data Primer Diolah dari Bidang Keuangan, 2022.

Dari tabel di atas dapat memberikan gambaran pada perbandingan waktu yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah saat dilakukan dengan cara menggunakan Microsoft excel dan dilakukan dengan menggunakan SIMDA Keuangan yang dapat dilihat jelas bahwa penerapan menggunakan SIMDA Keuangan mampu mempersingkat waktu yang lebih signifikan dari waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b) Kepuasan Terhadap Infrastruktur

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Staff Bidang Keuangan Ibu Suhartatik mengungkapkan *“kepuasan karyawan dalam menggunakan SIMDA Keuangan juga tergantung bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMDA pada bidang keuangan, kendala yang sering terjadi yaitu terbatasnya teknologi dan infrastruktur”*. Dalam hal tersebut maka :

a) Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai merupakan komponen yang penting dalam penerapan SIMDA Keuangan, sehingga infrastruktur tersebut harus sesuai dengan kebutuhan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

Kurangnya infrastruktur yang menunjang dalam penerapan SIMDA Keuangan di Bidang Keuangan dan Kesekretariatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 6. 7 Jumlah Alat Infrastruktur Bidang Keuangan Dinas PUPR

No	Nama Barang	Jumlah
1	Komputer dan Laptop	7
2	Server	2
3	LAN jaringan	1
4	Wifi	1

Sumber : Kantor Bidang Keuangan Dinas PUPR Kab.Kudus

Jika dilihat dari tabel di atas jumlah komputer dan laptop memang cukup bagi pegawai akan tetapi jumlah komputer dan laptop yang support untuk menjalankan program aplikasi SIMDA Keuangan hanyalah Sebagian kecil saja, sedangkan jumlah wifi yang ada hanya terbatas.

DATA KUESIONER KEPUASAN PENGGUNAAN SIMDA KEUANGAN

Tabel 6. 8 Kuesioner Kepuasan Penggunaan SIMDA Keuangan

Timestamp	Nama	Apakah saudara mengenal aplikasi SIMDA Keuangan?	Apakah saudara bisa menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan ?
9/7/2022 14:23:46	DIYAH WINARNI	YA	YA
9/7/2022 14:24:59	FARA	YA	YA
9/7/2022 14:31:21	MEGA FEBRIANA SARI RULLASTUTI	YA	YA
9/7/2022 14:37:57	CINTYA	YA	YA
9/7/2022 14:41:01	NUR AKHWAN	YA	YA
9/7/2022 14:49:45	NUR FAUZIAH	YA	YA
9/7/2022 16:42:21	SUHARTATIK	YA	YA

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Pada data di atas terdapat tujuh karyawan bidang keuangan yang dominan sudah mengerti aplikasi simda keuangan dan bisa menjalankan aplikasi.

Tabel 6. 9 Kuesioner Kepuasan Penggunaan SIMDA Keuangan

Menurut saudara apakah penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan sudah berjalan maksimal ?	Apakah penerapan SIMDA Keuangan di Dinas PUPR Kudus sudah mencapai sasaran ?	Bagaimanakah kepuasan saudara dalam menggunakan SIMDA Keuangan ?
BELUM MAKSIMAL	YA	KURANG PUAS
BELUM MAKSIMAL	YA	KURANG PUAS
CUKUP MAKSIMAL	YA	KURANG PUAS
BELUM MAKSIMAL	YA	CUKUP PUAS
SUDAH MAKSIMAL	YA	SANGAT PUAS
BELUM MAKSIMAL	YA	CUKUP PUAS
BELUM MAKSIMAL	YA	KURANG PUAS

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Pada data di atas dapat disimpulkan penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dominan belum maksimal dan belum puas dalam penggunaan, tetapi sasaran penerapan simda sudah tepat, yakni untuk karyawan bidang keuangan.

Tabel 6. 10 Kuesioner Kepuasan Penggunaan SIMDA Keuangan

Menurut saudara, apa faktor penghambat dalam penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan ?	Menurut saudara, apa faktor pendukung dalam penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan ?
jaringan yang sering lambat yang mempengaruhi pengerjaan laporan, sehingga membuat laporan keuangan juga terlambat untuk dilaporkan	lebih mudah dalam penginputan dan pengecekan karena terpusat
Wifi kantor aja yang menghambat. sehingga pengoperasian aplikasi kurang berjalan maksimal karena sistem eror ketika jaringan lambat	Wifinya doong yg jd pendukung utama. Jaringan internet.
Aplikasi suka eror. Akibatnya jika sudah menginput data kemudian eror, maka data tersebut harus mengulang dari awal kembali sehingga laporan terlambat	Jaringannya, karena jika jaringan tidak lancar maka simda keuangan tidak berjalan dengan maksimal
Jaringan sering lemot, sehingga pelaporan keuangan semakin terlambat, tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya	Karena sistemnya terpusat, jadi mudah untuk dikoreksi bila terjadi kesulitan
sistem terkadang error yang harus mengulang kembali dari awal untuk menginput data	sinyal, karena simda keuangan harus menggunakan sinyal
Jaringan yang sering trobel, hal tersebut mempengaruhi kinerja simda keuangan karena harus mengulang dari awal kembali	SIMDA dapat mempercepat proses pembukuan dan meminimalisir kesalahan, apabila jaringannya bagus
Kurangnya pengembangan aplikasi secara maksimal sehingga kinerja aplikasi menjadi terhambat (lemot).	Jaringan stabil serta pengembangan aplikasi yang harus dioptimalkan dan perlunya kemudahan dalam pengoperasian.

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Pada data di atas menunjukkan penghambat penggunaan aplikasi adalah jaringan yang kurang mendukung serta sistem yang sering eror, akibatnya data yang sudah diinput harus diulang dari awal kembali.

Tabel 6. 11 Kuesioner Kepuasan Penggunaan SIMDA Keuangan

Apakah penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan ? Mengapa ?	Pendapat atau komentar lain
bisa krn keuangan lbh rapi dan tepat	harus ada pengembangan aplikasi dari pemerintah pusat agar aplikasi bisa digunakan secara offline
Enggak juga. Sesuai kok.	harus mengoptimalkan jaringan dan perbaikan aplikasi agar membantu proses pembuatan laporan keuangan
Iya, karena jika simda lancar maka pengoperasian laporan juga lancar, dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan	Jangan sering eror biar semakin cepat bikin laporannya
Bisa. Karena pencatatan keuangan jadi lebih tepat dan rapi	-
sangat berpengaruh, pelaporan lebih cepat	sudah bagus
Ya. Karena salah input segera terdeteksi, tetapi harus mengulang dari awal kembali.	Simda banyak membantu proses pembukuan... dqta data pembukuan bbrp tahun kebelakang bisa dpat cepat tersaji
Sangat mempengaruhi, karena sangat membantu dalam input laporan keuangan.	Optimalkan kinerja aplikasi dan jaringan, serta dipermudah lagi untuk penggunaan aplikasinya.

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Pada data di atas menunjukkan penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dapat mempengaruhi kualitas laporan akan tetapi pengoptimalan kinerja aplikasi dan jaringan masih harus dilakukan guna membantu kinerja karyawan.

PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN

A. MENU PEMBUKUAN SKPD

Laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh SKPD sebagai entitas akuntansi adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO)
- c. Neraca
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Submenu Pembukuan pada SKPD fungsinya sama dengan submenu pada SKPKD/PPKD.

1. Jurnal/Jurnal Akrual



Dalam hal terdapat transaksi diluar penerimaan dan pengeluaran anggaran

maka pencatatan dilakukan pada sub menu *Jurnal*. Transaksi yang diinput di sub menu ini adalah Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Koreksi.

Input data Jurnal dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Klik menu Data Entry lalu pilih sub menu Pembukuan kemudian pilih Jurnal lalu pilih unit organisasi, maka akan tampil form Jurnal dibawah ini:



Yang harus diperhatikan dalam prosedur pencatatan dengan menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 adalah sebagai berikut:

Fungsi Pembukuan mempunyai fungsi melakukan pencatatan transaksi dari dokumen sumber ke dalam jurnal, jurnal akrual dan melakukan *posting (data jurnal CTA dan data jurnal akrual)*. Jurnal dan jurnal akrual harus didasarkan pada dokumen sumber yang lengkap, akurat dan dapat diyakini kebenarannya.

- a. Pencatatan jurnal sudah dilakukan secara otomatis oleh Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 apabila dipilih setting ‘pengakuan akrual bersamaan dengan pengakuan LRA.
- b. Penjurnalan secara otomatis dibedakan antara SKPD dan PPKD, di SKPD penjurnalan transaksi akrual yaitu Pendapatan-LO dan Beban dengan lawan menggunakan akun/rekening *reciprocal* yaitu R/K PPKD dan R/K SKPD. Sedangkan untuk LRA yaitu pendapatan-LRA dan Belanja akan menambah atau mengurangi akun Perubahan SAL. Pada unit PPKD, untuk transaksi akrual yaitu Pendapatan-LO dan Beban langsung menambah atau mengurangi Kas Daerah tanpa melalui Rekening *reciprocal* R/K SKPD atau R/K PPKD. Untuk transaksi LRA yaitu pendapatan-LRA dan Belanja, akan langsung mempengaruhi (menambah atau mengurangi) akun Perubahan SAL.
- c. Koreksi dan penyesuaian yang mempengaruhi laporan keuangan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006/PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II atau ***Cash Toward Akrual (CTA)*** diinputkan pada menu **Jurnal**. Contohnya adalah jurnal penyesuaian akhir tahun untuk persediaan, aktiva dalam pengerjaan, utang dan piutang.

penyusutan aktiva tetap, beban persediaan, beban amortisasi dan beban penyisihan piutang..

Langkah-langkah input data Jurnal/Jurnal AkruaI sebagai berikut :

- a. Klik menu Data Entry lalu pilih sub menu Pembukuan kemudian pilih Jurnal
lalu pilih unit organisasi, maka akan tampil form Jurnal dibawah ini:

Jurnal AkruaI SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

UNIT ORGANISASI

UNIT ORGANISASI

JURNAL

Klik **JURNAL**:

Jurnal AkruaI SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JURNAL AKRUAL

No. Bukti	Tgl. Bukti	Keterangan	No. BKU	No. Ref.
971/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Pendapatan-LO	9999	971
972/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Beban	9999	972
973/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Surplus/Defisit LO	9999	973
981/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Pendapatan-LRA	9999	981
982/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Belanja	9999	982
986/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Surplus/Defisit LRA dan/atau Pembiayaan Netto	9999	986
987/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup SILPA TAB	9999	987
989/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Penggabungan	9999	989
JP.2.1.1	31-Des-2014	Pencatatan hasil inventarisasi persediaan alat tulis kantor pad	17	
JP.2.1.2/1	31-Des-2014	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan Aset T	18	

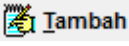
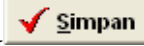
Cari

Nomor Bukti: 971/PENUTUP/1.20.5.1/20
 Tanggal Bukti: 31-Des-2014
 Nomor Ref.: 971
 Tanggal Ref.: 31-Des-2014
 Nomor BKU: 9999

Jenis Jurnal: Jurnal Umum - Penutup

Keterangan: Jurnal Penutup Pendapatan-LO

Tambah Ubah Hapus Simpan Batal Cetak Tutup

- b. isi data Jurnal dengan Klik tombol , isi informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan tanggal referensi, nomor bku, dan keterangan serta pilih jenis jurnal. Klik  untuk menyimpan data atau klik  untuk membatalkan transaksi.

Jurnal Akrua SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JURNAL AKRUAL

No. Bukti	Tgl. Bukti	Keterangan	No. BKU	No. Ref.
971/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Pendapatan-LO	9999	971
972/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Beban	9999	972
973/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Surplus/Defisit LO	9999	973
981/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Pendapatan-LRA	9999	981
982/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Belanja	9999	982
986/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Surplus/Defisit LRA dan/atau Pembiayaan Netto	9999	986
987/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup SILPA TAB	9999	987
989/PENUTUP/1.20.5.1/2014	31-Des-2014	Jurnal Penutup Penggabungan	9999	989
JP.2.1.1	31-Des-2014	Pencatatan hasil inventarisasi persediaan alat tulis kantor pada	17	
JP.2.1.2/1	31-Des-2014	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat beban penyesuaian Aset	18	

Cari

Nomor Bukti: JP.2.1.2/1
 Tanggal Bukti: 31-Des-2014
 Nomor Ref.:
 Tanggal Ref.:
 Nomor BKU: 18

Jenis Jurnal: Jurnal Umum - Penyesuaian
 Keterangan: Jurnal Penyesuaian Tetap tahun
 Jurnal Penyesuaian: Jurnal Umum - Penyesuaian, Jurnal Umum - Koreksi, Jurnal Umum - Korolari, Jurnal Umum - Balik, Jurnal Umum - Penutup

Tambah Ubah Hapus Simpan Batal Cetak Tutup

- c. Selanjutnya pilih halaman Jurnal Rincian, klik tombol , isikode rekening atau klik  untuk menampilkan data kode rekening belanja langsung/tidak langsung dan kode rekening:

- Tombol  pertama untuk menampilkan kode rekening Belanja Langsung/Tidak Langsung

Pemilihan Kode Rekening

Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung

Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan

Rekening	Uraian	Nilai
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis kantor	50.000
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	150.000
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	100.000
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	750.000

Pilih Batal

- Tombol  kedua untuk menampilkan kode rekening secara keseluruhan:

Pemilihan Kode Rekening Akrual

Akun	Kel.	Jns.	Oby.	Uraian Rekening Obyek
8	1	1	1	1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
8	1	1	2	2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO
8	1	1	3	3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	1	1	4	4 Pajak Air Permukaan - LO
8	1	1	5	5 Pajak Rokok - LO
8	1	1	6	6 Pajak Hotel - LO
8	1	1	7	7 Pajak Restoran - LO
8	1	1	8	8 Pajak Hiburan - LO
8	1	1	9	9 Pajak Reklame - LO
8	1	1	10	10 Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	1	11	11 Pajak Parkir - LO
8	1	1	12	12 Pajak Air Tanah - LO
8	1	1	13	13 Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	1	14	14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	1	15	15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	16	16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO

Cari Batal

Letakkan pointer pada kode rekening yang akan dipilih klik pilih untuk memilih atau klik  untuk membatalkan pilihan, secara otomatis halaman ini akan tertutup. Kemudian isi nilai jurnal dan

pilih debet/kredit kemudian klik  untuk menyimpan data atau klik  untuk membatalkan transaksi.

Jurnal Akrua SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JURNAL AKRUAL

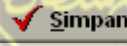
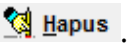
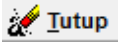
No. Bukti : JP.2.1.2/1

Rekening	Uraian Rekening	Nilai	Debet/Kredit
1.3.7.1.4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	200.000	K
9.1.7.1.4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	200.000	D

Program 0
Kegiatan 0
Rekening 1 3 7 1 4
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
Nilai 200.000
Debet/Kredit K

Jumlah Debet Rp. 200.000,00
Kredit Rp. 200.000,00
Saldo Rp. 0,00

Untuk ubah letakkan pointer pada record yang hendak diubah klik kemudian ubah data yang dikehendaki, klik  untuk menyimpan perubahan atau klik  untuk membatalkan. Sedangkan untuk menghapus record letakkan pointer pada record yang akan dihapus kemudian klik tombol . Klik  untuk keluar dari halaman ini.

d. Hasil inputan berupa Memo Pembukuan dapat dilihat dengan klik

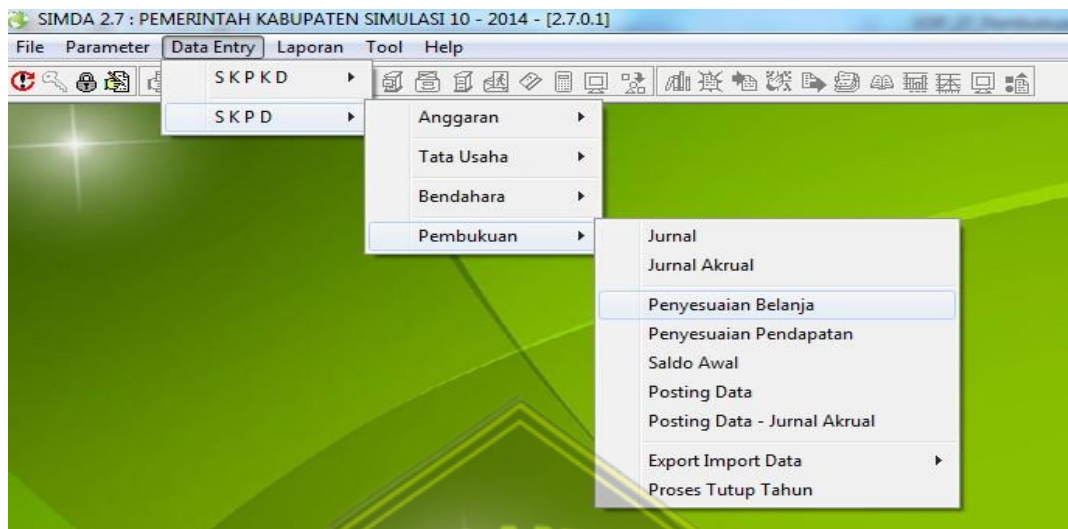
tombol  **Cetak** :

 PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10 MEMO PEMBUKUAN Tahun Anggaran 2014			
Nomor : JP.2.1.2/1 Tanggal : 31 Desember 2014 SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Kode Perkiraan	Deskripsi Perkiraan	Jumlah Debet	Jumlah Kredit
00.00 : 9.1.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	200.000,00	
00.00 : 1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor		200.000,00
Keterangan : Jurnal Penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan Aset Tetap tahun 2013			
Bukti Pendukung : 1. 2. 3.		Nomor	Tanggal
Dicatat Oleh :		Disetujui :	Auditor :

- e. Hasil inputan Jurnal dapat dicetak melalui menu Laporan – SKPD – Pembukuan.

 PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10 JURNAL UMUM - PENYESUAIAN Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2014							
Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1.20 Unit Organisasi : 1.20.05 Sub Unit Organisasi : 1.20.05.01		Urutan Kerja Pemerintah Umum BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKONING	URAIAN	REP	DEBIT	KREDIT
1	31-Des-2014	JP.2.1.1	1.20.05.01.00.00.1.1.7.01.01 1.20.05.01.00.00.9.1.2.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor Beban Persediaan Alat Tulis Kantor (Pencatatan hasil inventarisasi persediaan alat tulis kantor pada akhir tahun berjalan)	f f	30.000,00	
2		JP.2.1.2/1	1.20.05.01.00.00.9.1.7.01.04 1.20.05.01.00.00.1.3.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor (Jurnal Penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan Aset Tetap tahun 2013)	f f	200.000,00	
3		JP.2.1.2/2	1.20.05.01.00.00.9.1.7.02.01 1.20.05.01.00.00.1.3.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja (Jurnal Penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan Aset Tetap tahun 2013)	f f	50.000,00	
4		JP.2.1.2/3	1.20.05.01.00.00.9.1.7.04.01 1.20.05.01.00.00.1.3.7.04.01	Beban Penyusutan Buku Akumulasi Penyusutan Buku (Jurnal Penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan Aset Tetap tahun 2013)	f f	10.000,00	
JUMLAH							290.000,00
Simulasi, 10 Juni 2014							
NIP.:							

2. Penyesuaian Belanja



Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian belanja berupa koreksi atau pengurangan.

Penyesuaian merupakan kegiatan pembetulan akuntansi di akhir tahun sehingga pos-pos yang ada di laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tindakan penyesuaian yang dilakukan dengan menggunakan jurnal penyesuaian yang biasanya dilakukan pada akhir tahun. Hal-hal yang biasanya akan dilakukan penyesuaian antara lain : saldo kas, persediaan, aktiva dalam pengerjaan, utang dan piutang. Sedangkan tindakan koreksi yang dilakukan dengan menggunakan jurnal koreksi dapat dilakukan sepanjang tahun.

Input data dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Klik menu Data Entry lalu pilih sub menu Pembukuan kemudian pilih Penyesuaian Belanja lalu pilih unit organisasi maka akan tampil form berikut :

 The screenshot shows a form titled "Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10". The form has a header section with "BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH" and "PENYESUAIAN BELANJA". Below this, there is a section labeled "UNIT ORGANISASI" with three options: "KOREKSI", "PENGURANGAN", and "PENAMBAHAN".

- b. Untuk input koreksi belanja klik **KOREKSI** akan tampil form inputan seperti berikut :

Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOREKSI BELANJA

No Bukti	Tgl Bukti	No Ref	Tgl_Ref	No BKU	Keterangan
001/JK/VV/2014	30/06/2014	001JK	25/06/2014	10004	Koreksi Belanja Barang Suku Cadang

Nomor Bukti: 001/JK/VV/2014
 Tanggal Bukti: 30/06/2014
 Nomor Ref.: 001JK
 Tanggal Ref.: 25/06/2014
 Nomor BKU: 10004
 Jenis SPM: Ganti Uang Persediaan (GU)

Keterangan: Koreksi Belanja Barang Suku Cadang

Cari:
 Tambah Ubah Hapus Simpan Batal Cetak Tutup

- c. isi data koreksi belanja dengan klik tombol **Tambah**, isi informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan tanggal referensi, jenis PANJAR dan keterangan. Klik **Simpan** untuk menyimpan data atau klik **Batal** untuk membatalkan transaksi.
- d. Selanjutnya pilih halaman Rincian, klik tombol **Tambah**, isi informasi yang dibutuhkan seperti Program, Kegiatan (bila ada, apabila tidak secara otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan), kode rekening atau klik  untuk menampilkan data kode rekening

pendapatan, nilai dan D atau K. Klik  untuk menyimpan data atau klik  untuk membatalkan transaksi.

Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOREKSI BELANJA

No. Bukti : 001/JK/VI/2014

Jumlah	Debet Rp.	1.000.000,00
Kredit Rp.	1.000.000,00	
Saldo Rp.	0,00	

Kode Rekening	Uraian	D/K	Nilai
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	K	1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	D	1.000.000,00

Program 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 4 Pengadaan mobil jabatan

Rekening 5 2 2 5 2 Belanja Penggantian Suku Cadang

Nilai 1.000.000,00

Debet/Kredit D








e. Untuk input pengurangan belanja klik  akan tampil forminputan seperti berikut :

Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENGURANGAN BELANJA

No Bukti	Tgl Bukti	No Ref	Tgl Ref	No BKU	Keterangan
001/PB/2014	30/06/2014	1002	10/06/2014	10008	Pengurangan jasa servis kendaraan

Nomor Bukti 001/PB/2014

Tanggal Bukti 30/06/2014 

Nomor Ref. 1002

Tanggal Ref. 10/06/2014 

Nomor BKU 10008

Bank Bank A 

Jenis SPM Langsung (LS) 

Cari

Keterangan

Pengurangan jasa servis kendaraan








- f. isi data pengurangan belanja dengan klik tombol , isi informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan tanggal referensi, nama bank, jenis pengurangan dan keterangan. Klik  untuk menyimpan data atau  untuk membatalkan transaksi.
- g. Selanjutnya pilih halaman Rincian, klik tombol , isi informasi yang dibutuhkan seperti Program, Kegiatan (bila ada, apabila tidak secara otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan), kode rekening atau klik  untuk menampilkan data kode rekening pendapatan dan nilai. Klik  untuk menyimpan data atau klik  untuk membatalkan transaksi.

Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENGURANGAN BELANJA

No. Bukti : 001/PB/2014

Kode Rekening	Uraian	Nilai
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	200.000,00

Jumlah 200.000,00

Program 

Kegiatan 

Rekening 

Belanja Jasa Service

Nilai

- h. Submenu ini digunakan untuk input data belanja historis. Untuk input penambahan belanja klik **PENAMBAHAN** akan tampil form inputan seperti berikut :

Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENAMBAHAN BELANJA

Penambahan ::

Rincian ::

No Bukti	Tgl Bukti	No Ref	Tgl_Ref	No BKU	Keterangan
12/PNB/2014	30/06/2014	1001	24/06/2014	10009	

Nomor Bukti: 12/PNB/2014

Tanggal Bukti: 30/06/2014

Nomor Ref.: 1001

Tanggal Ref.: 24/06/2014

Nomor BKU: 10009

Bank: Bank A

Jenis SPM: Ganti Uang Persediaan (GU)

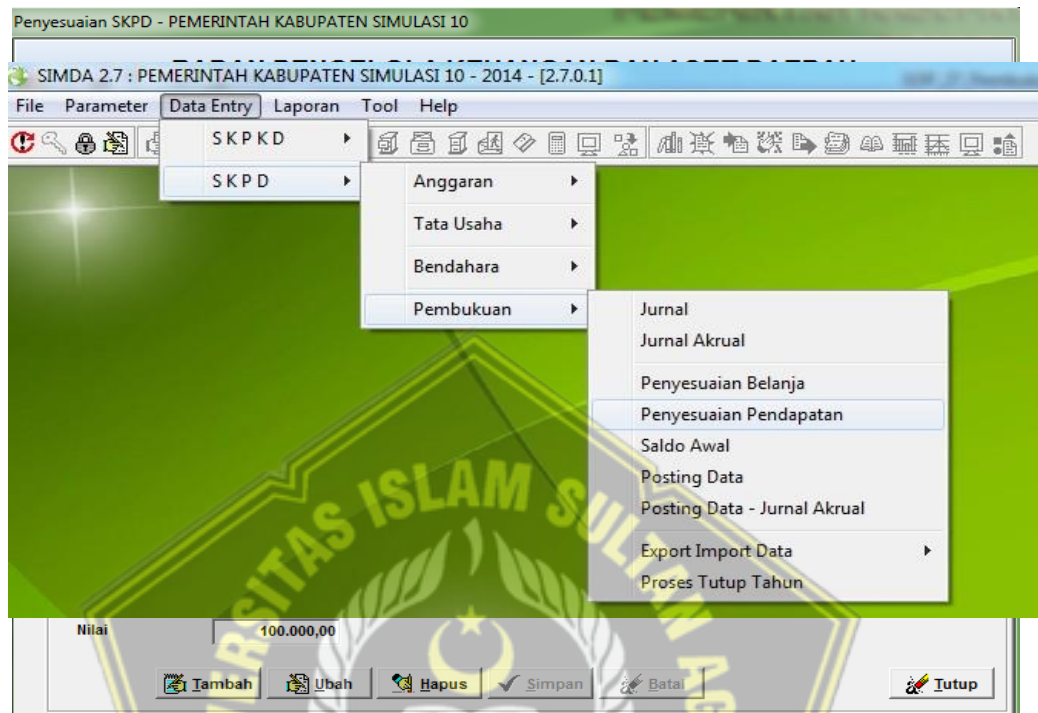
Keterangan

Cari

Tambah
Ubah
Hapus
Simpan
Batal
Tutup

- i. isi data penambahan belanja dengan klik tombol **Tambah**, isi informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan tanggal referensi, nama bank, jenis pengurangan dan keterangan. Klik **Simpan** untuk menyimpan data atau klik **Batal** untuk membatalkan transaksi.
- j. Selanjutnya pilih halaman Rincian, klik tombol **Tambah**, isi informasi yang dibutuhkan seperti Program, Kegiatan (bila ada, apabila tidak secara otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan), kode rekening atau klik  untuk menampilkan data kode rekening

pendapatan dan nilai.  untuk menyimpan data atau klik untuk membatalkan transaksi.

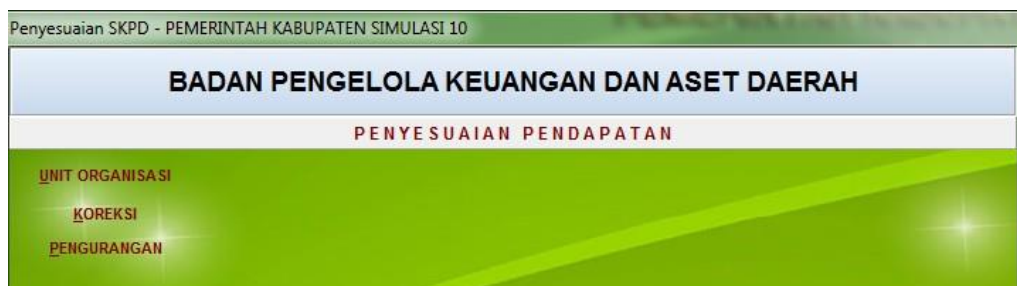


3. Penyesuaian Pendapatan

Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian pendapatan berupa koreksi atau pengurangan/restitusi.

Input data dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Klik menu Data Entry lalu pilih sub menu Pembukuan kemudian pilih Penyesuaian Pendapatan lalu pilih unit organisasi maka akan tampil form berikut :



Untuk input koreksi pendapatan klik **KOREKSI** akan tampil form inputan seperti berikut :

Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOREKSI PENDAPATAN

Koreksi ::

Rincian ::

No Bukti	Tgl Bukti	No Ref	Tgl_Ref	No BKU	Keterangan
001/PP/2014	30/06/2014	001/PP	30/06/2014	10010	Penyesuaian Pajak Hotel

Nomor Bukti:

Tanggal Bukti:

Nomor Ref.:

Tanggal Ref.:

Nomor BKU:

Cari:

Keterangan:

Tambah
Ubah
Hapus
Simpan
Batal
Cetak
Tutup

b. isi data koreksi pendapatan dengan Klik tombol , isi informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan tanggal referensi dan keterangan. Klik  untuk menyimpan data atau klik  untuk membatalkan transaksi.

c. Selanjutnya pilih halaman Rincian, klik tombol , isi informasi yang dibutuhkan seperti Program, Kegiatan (bila ada, apabila tidak secara otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan), kode rekening atau klik untuk menampilkan data kode rekening pendapatan, nilai dan D atau K. Klik  untuk menyimpan data atau klik

 untuk membatalkan transaksi

Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOREKSI PENDAPATAN

No. Bukti : 001/PP/2014

Kode Rekening	Uraian	D/K	Nilai
4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	D	10.000.000,00
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	K	10.000.000,00

Jumlah Debet Rp. 10.000.000,00
Kredit Rp. 10.000.000,00
Saldo Rp. 0,00

Program Non Program

Kegiatan Non Kegiatan

Rekening Restoran

Nilai

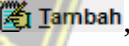
Debet/Kredit








yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan tanggal referensi dan keterangan. Klik  untuk menyimpan data atau klik  untuk membatalkan transaksi.

Selanjutnya pilih halaman Rincian, klik tombol , isi informasi yang dibutuhkan seperti Program, Kegiatan (bila ada, apabila tidak secara otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan), kode rekening atau klik untuk menampilkan data kode rekening pendapatan, nilai dan D atau K. Klik  untuk menyimpan data atau

- d. klik  untuk membatalkan transaksi.

Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOREKSI PENDAPATAN

No. Bukti : 001/PP/2014

Kode Rekening	Uraian	D/K	Nilai
4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	D	10.000.000,00
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	K	10.000.000,00

Jumlah Debet Rp. 10.000.000,00
Kredit Rp. 10.000.000,00
Saldo Rp. 0,00

Program Non Program
 Kegiatan Non Kegiatan
 Rekening
 Restoran
 Nilai
 Debet/Kredit

- e. Untuk input pengurangan pendapatan klik **PENGURANGAN** akan tampil forminputan seperti berikut :

Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

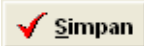
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENGURANGAN PENDAPATAN

No Bukti	Tgl Bukti	No Ref	Tgl Ref	No BKU	Keterangan
002/PP/2014	30/06/2014	002/PP	25/06/2014	10011	

Nomor Bukti
 Tanggal Bukti
 Nomor Ref.
 Tanggal Ref.
 Nomor BKU
 Bank
 Jenis Pengurangan

isi data pengurangan pendapatan dengan Klik tombol, isi informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan tanggal referensi, nama bank, jenis pengurangan dan keterangan. Klik  untuk menyimpan data atau klik  untuk membatalkan transaksi.

- f. Selanjutnya pilih halaman Rincian, klik tombol , isi informasi yang dibutuhkan seperti Program, Kegiatan (bila ada, apabila tidak secara otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan), kode rekening atau klik  untuk menampilkan data kode rekening pendapatan dan nilai. Klik  untuk menyimpan data atau klik  untuk membatalkan transaksi.

Penyesuaian SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENGURANGAN PENDAPATAN

No. Bukti : 002/PP/2014

Kode Rekening	Uraian	Nilai
*		
4 . 1 . 1 . 03 . 01	Tontonan Film/Bioskop	500.000,00

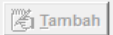
Jumlah 500.000,00

Program 

Kegiatan 

Rekening 

Nilai

4. Saldo awal

Dalam Aplikasi Simda Versi 2.7, fungsi Pembukuan atau Akuntansi harus melakukan penginputan Saldo Awal.

Saldo Awal Neraca

Saldo Awal Neraca merupakan saldo akhir neraca tahun lalu. Dalam hal ini adalah Neraca SKPD tahun lalu, terhubung Neraca Pemerintah Daerah adalah gabungan dari Neraca-neraca SKPD.

Sub menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat atau memasukkan data/informasi Neraca Awal dan Laporan Realisasi Anggaran Pemda.

Yang harus diperhatikan dalam penginputan Saldo Awal Neraca dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 adalah :

- a. Login pada Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 harus tahun sebelumnya dan data umum Penda/SKPD harus diisi. Input Saldo Awal dilakukan dengan login pada sebelumnya dimaksudkan untuk menampilkan Laporan Keuangan Komparatif dengan tahun sebelumnya.

Contoh :

Transaksi tahun berjalan adalah tahun anggaran 2007 maka tahun loginnya adalah 2007. Sehingga untuk memasukkan Saldo Awal Neraca tahun lalu harus login tahun 2006.

- b. Saldo Normal/pilihan Debet dan Kredit harus benar.
- c. Saldo awal neraca harus diinput secara lengkap baik untuk Rekening Aset, Kewajiban maupun Rekening Ekuitas sesuai rekening permendagri 13/2006, 59/2007 dan 21/2011.
- d. Saldo Awal Neraca tahun lalu harus diisi agar posisi keuangan pada saat tertentu menyajikan data yang wajar dan sesuai dengan yang sebenarnya. Saldo Awal Neraca tahun lalu akan mempengaruhi Saldo

Akhir Neraca tahun berjalan.

- e. Saldo awal Neraca yang diinputkan adalah saldo awal sebelum penggabungan dan masih sesuai rekening permendagri 13/2006,

Proses penginputan saldo awal neraca untuk SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

Debet		Kredit	
1.	Kas di bendahara Pengeluaran	1.	R/K PPKD dan/atau Hutang PFK
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	2.	SiLPA
3.	Persediaan	3.	Cadangan Untuk Persediaan
4.	Piutang	4.	Cadangan Untuk Piutang
5.	Aset Tetap	5.	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
6.	Aset Lainnya	6.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)
7.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	7.	Hutang Jangka Pendek

Sesuai dengan uraian tersebut di atas terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Hal-hal tersebut adalah:

- Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran dilawankan R/K PPKD jika sisa kas tersebut merupakan sisa dari uang persediaan yang harus disetorkan pada tahun berikutnya.
- Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran dilawankan dengan Hutang PFK, jika sisa kas tersebut merupakan uang pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir tahun masih belum disetorkan ke kas negara.

Langkah-langkah input saldo awal Neraca adalah sebagai berikut :

- Klik menu Data Entry SKPD, pilih sub menu Pembukuan kemudian pilih Saldo Awal lalu pilih unit organisasi maka akan

tampil form Saldo Awal dibawah ini :

- b. Klik **NERACA** akan muncul tampilan berikut:

Saldo Awal - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SALDO AWAL NERACA

Rekening	Uraian Rekening	Anggaran	Saldo	D/K
▶ 1.1.1.1.1	Kas di Bank		25.000.000	D
1.1.3.1.1	Piutang Pajak Hotel		5.000.000	D
1.1.3.1.2	Piutang Pajak Restoran		2.000.000	D
1.1.5.1.1	Persediaan Alat Tulis kantor		250.000	D
1.1.8.1.1	R/K SKPD		7.750.000	D
2.1.1.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Taspen		2.500.000	K
2.1.1.2.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Askes		7.500.000	K
2.2.1.4.1	Utang Pemerintah Provinsi		25.000.000	K
3.1.1.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		5.000.000	K

Rekening: 1 1 1 1 1

Saldo: 25.000.000

Debet/Kredit: DEBIT

Jumlah
Debet : 40.000.000
Kredit : 40.000.000

Tambah Ubah Hapus Simpan Batal Tutup

isi data saldo awal dengan Klik **Tambah** lalu isi atau pilih kode rekening, kemudian pilih debet (D) atau kredit (K), isi nilai saldo dan catatan yang diperlukan klik tombol untuk menyimpan data. Klik **Simpan**

untuk menyimpan data atau klik **Batal** untuk membatalkan transaksi. Pengisian saldo awal dilakukan pada tiap SKPD sesuai kondisi aset dan kewajiban dibawah pengelolaannya.

5. Saldo Awal LRA dan LAK

Saldo Awal LRA merupakan LRA tahun lalu SKPD. LRA Pemerintah Daerah adalah gabungan dari LRA semua SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal LRA biasanya pemerintah daerah hanya membuat

LRA untuk Pemerintah Daerah tidak per SKPD dan dibuat oleh unit pengelola keuangan. Untuk kondisi yang demikian, pemerintah daerah harus menyajikan kembali LRA tahun lalu per SKPD sehingga pada tahun berikutnya dapat disajikan secara komparatif per SKPD. Hal-hal yang harus diperhatikan

dalam Saldo Awal LRA dalam Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 diantaranya :

- a. Login pada Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 harus tahun sebelumnya. (Seperti pada point Saldo Awal Neraca)
- b. Saldo Normal/pilihan Debet dan Kredit harus benar.
- c. Penginputan saldo rekening pendapatan dan belanja tahun lalu dilakukan untuk masing-masing SKPD agar laporan LRA per SKPD dapat disajikan secara komparatif
- d. Pengaruh dalam Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 jika Saldo Awal LRA tidak ada maka laporan keuangan khususnya LRA akan disajikan tidak komparatif. Saldo Awal LRA tidak akan mempengaruhi pada Saldo Akhir LRA tahun berjalan.
- e. Penginputan Saldo PFK tahun lalu dilakukan di unit SKPD dan unit PPKD. Di unit SKPD nilai yang diinput adalah nilai Penerimaan dan Pengeluaran PFK yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran. Sedangkan di unit PPKD nilai yang diinput adalah nilai Penerimaan dan Pengeluaran PFK yang dilakukan melalui SP2D LS dan SP2D Non
- f. Saldo Awal LAK merupakan LAK tahun lalu yang dibuat oleh BUD atau unit pengelola keuangan. LAK tidak perlu disajikan kembali per SKPD karena LAK merupakan laporan yang harus dibuat oleh BUD untuk pemerintah daerah secara keseluruhan.

Langkah penginputan data LAK sama dengan penginputan Saldo awal Neraca

2. Posting Data Jurnal/Jurnal Akrual



Submenu ini digunakan untuk melakukan posting data realisasi pengeluaran dan penerimaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan posting data adalah sebagai berikut:

- Dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 Fungsi Pembukuan harus menyakini kebenaran akan dokumen sumber pencatatan seperti dijelaskan pada point nomor 1 pada saat melakukan *posting* data dan *posting* data jurnal akrual.
- Posting* merupakan sarana pengesahan/*approve* dari fungsi pembukuan untuk mengklasifikasikan rekening dari setiap transaksi yang terjadi.
- Fungsi Pembukuan harus melakukan pencetakan Memo Jurnal sebagai dokumen pengesahan/*approve*.
- Proses *posting* data dan *posting* data jurnal akrual seharusnya dilakukan sekali untuk setiap transaksi oleh karena itu Fungsi Pembukuan harus melakukan pengesahan/*approve* berdasarkan keyakinan yang memadai

seperti diuraikan pada point nomor 1. Kesalahan dapat diperbaiki dengan melakukan jurnal koreksi atas transaksi yang bersangkutan berdasarkan pengesahan/*approve* dari Fungsi Pembukuan.

- e. Namun jika terdapat kesalahan pada saat proses *posting* data, kesalahan *posting* data tersebut masih dapat diperbaiki dengan melakukan proses "*unposting*". Proses *unposting* hanya dapat dilakukan oleh *user* dengan level administrator.

Langkah-langkah posting jurnal/jurnal akrual adalah sebagai berikut :

- a. Klik menu Data Entry lalu pilih sub menu Pembukuan kemudian pilih Posting lalu pilih unit organisasi maka akan tampil form Posting dibawahini :

- b. Klik **POSTING** akan muncul tampilan berikut :

- c. Beri tanda ☒ pada data yang akan diposting, kemudian klik **Posting**

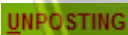
Tanggal	No. Bukti	No. BKU	Keterangan
☐ 31/12/2014	973/PENUTUP/1.20.:	9999	Jurnal Penutup Surplus/Defisit LO
☐ 31/12/2014	981/PENUTUP/1.20.:	9999	Jurnal Penutup Pendapatan-LRA
☐ 31/12/2014	989/PENUTUP/1.20.:	9999	Jurnal Penutup Penggabungan

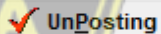
Kode Rekening	Kd. Prog.	Kd. Keg.	Uraian Rekening	Debet	Kredit
3.1.1.01.01	0	0	Ekuitas	205.000,00	
3.1.2.01.01	0	0	Surplus/Defisit LO		205.000,00

untuk melakukan proses posting atau  untuk membatalkannya.

- d. Transaksi yang telah diposting dapat dilihat dengan cara klik  seperti berikut :

Posting Jurnal SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10						
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
POSTING JURNAL						
	Tanggal	No. Bukti	No. BKU	Keterangan		
☒	31/12/2014	971/PENUTUP/1.20.1	9999	Jurnal Penutup Pendapatan-LO		
☒	31/12/2014	972/PENUTUP/1.20.1	9999	Jurnal Penutup Beban		
☒	31/12/2014	982/PENUTUP/1.20.1	9999	Jurnal Penutup Belanja		
☒	31/12/2014	986/PENUTUP/1.20.1	9999	Jurnal Penutup Surplus/Defisit LRA dan/atau Pembiayaan Netto		
☒	31/12/2014	987/PENUTUP/1.20.1	9999	Jurnal Penutup SILPA TAB		
☒	31/12/2014	JP.2.1.1	17	Pencatatan hasil inventarisasi persediaan alat tulis kantor pada akhir tahun pelaporan		
☒	31/12/2014	JP.2.1.2/1	18	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan Aset Tetap tahun 2013		
☒	31/12/2014	JP.2.1.2/2	19	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan Aset Tetap tahun 2013		
☒	31/12/2014	JP.2.1.2/3	20	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan Aset Tetap tahun 2013		
Kode Rekening	Kd. Prog.	Kd. Keg.	Uraian Rekening		Debet	Kredit
8.1.1.07.01	0	0	Restoran - LO		200.000,00	
8.1.2.01.01	0	0	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO		300.000,00	
3.1.2.01.01	0	0	Surplus/Defisit LO			500.000,00

- e. Untuk membatalkan transaksi yang telah diposting klik  , Pilih transaksi yang akan dibatalkan dengan

menghilangkan tanda ☒ kemudian klik .

- f. Hasil jnnitan berupa memo jurnal dapat dilihat dengan cara klik tombol  .

 PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10 MEMO JURNAL Tahun Anggaran			
Nomor : JT.2.2 Tanggal : 2 Januari 2014 SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Kode Perkiraan	Deskripsi Perkiraan	Jumlah Debet	Jumlah Kredit
00.00.2.1.8.01.01	R/K Pusat	24.000,00	
00.00.1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		24.000,00
00.00.3.1.5.01.01	Pendapatan yang Dilangguikan	24.000,00	
00.00.4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berian		24.000,00
Keterangan : Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2013 ke Kas Daerah			
Bukti Pendukung :		Nomor	Tanggal
1.			
2.			
3.			
Dicatat Oleh :		Disetujui :	Auditor :

- g. Hasil inputan Jurnal dapat dicetak melalui menu Laporan – SKPD –Pembukuan/Pembukuan akrual.

S

PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2014

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib					
Bidang Pemerintahan : 1.20		Pemerintahan Umum					
Unit Organisasi : 1.1.20.03		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
Sub Unit Organisasi : 1.1.20.03.01		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKONSING	U R A I A N	KUP	DEBIT	KREDIT
1	30-Des-2014	JP.2.1.1	1.20.03.01.00.00.1.1.7.01.01 1.20.03.01.00.00.9.1.1.2.01.01	Persediaan Aset Tula Kantor Beban Persediaan Aset Tula Kantor (Persediaan hasil inventarisasi persediaan aset tula kantor pada akhir tahun berjalan)	f	30.000,00	
2		JP.2.1.2	1.20.03.01.00.00.9.1.1.7.01.04 1.20.03.01.00.00.1.1.3.7.01.04	Beban Penyusutan Aset Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Aset Angkutan Darat Bermotor Cumulatif Penyusutan untuk mencatat beban penyusutan Aset Tida berjalan 2014	f	200.000,00	
3		JP.2.1.2	1.20.03.01.00.00.9.1.1.7.02.01 1.20.03.01.00.00.1.1.3.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Cumulatif Penyusutan untuk mencatat beban penyusutan Aset Tida berjalan 2014	f	30.000,00	
4		JP.2.1.2	1.20.03.01.00.00.9.1.1.7.04.01 1.20.03.01.00.00.1.1.3.7.04.01	Beban Penyusutan Buku Akumulasi Penyusutan Buku Cumulatif Penyusutan untuk mencatat beban penyusutan Aset Tida berjalan 2014	f	10.000,00	
JUMLAH						280.000,00	

7. Export Import Data

Menu ini digunakan untuk ekspor impor data saldo awal dan Posting Jurnal.

- a. Klik menu Data Entry dan pilih menu SKPD - Pembukuan - Ekspor ImporData – Saldo Awal, pilih SKPD yang akan diekspor data

Ekspor Import - Saldo Awal

PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

Data Saldo Awal

Urusan	1 Urusan Wajib
Bidang	20 Pemerintahan Umum
Unit / Perangkat Daerah	5 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit	2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

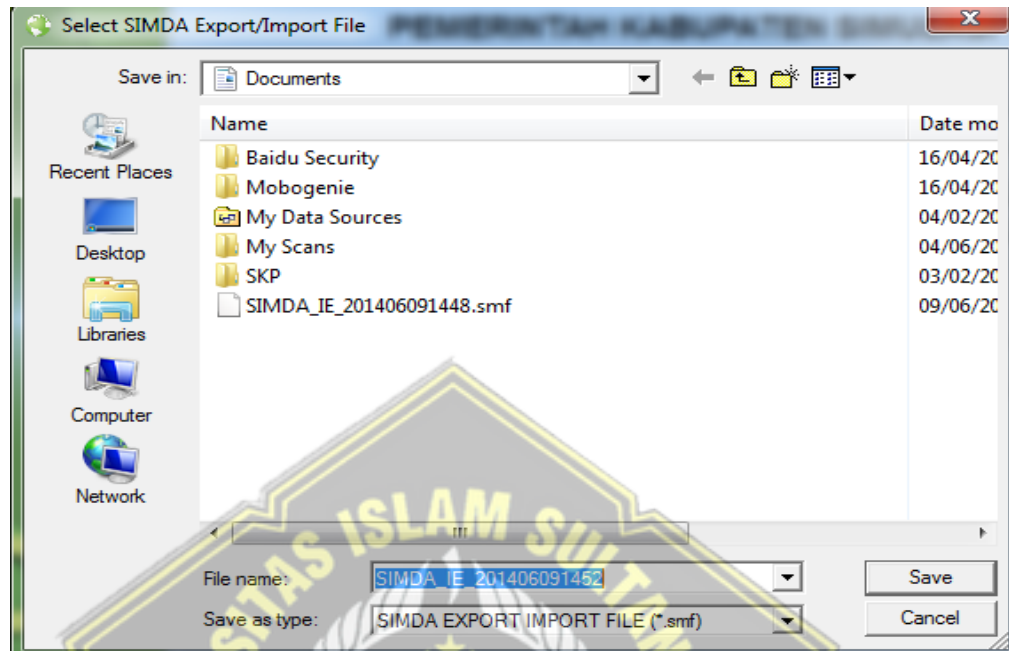
Ekspor :: Impor ::

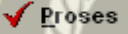
Nama File (.smf)

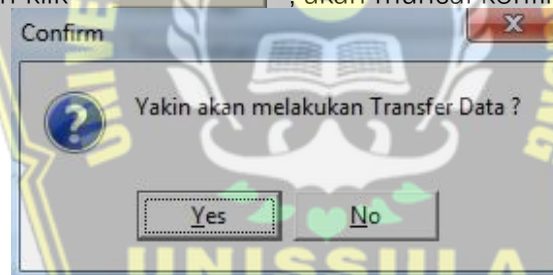
Proses Keluar

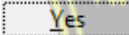
saldo awal-nya:

- b. Isi nama file dengan cara klik  untuk menampilkan Back Up File berikut :



kemudian klik , akan muncul konfirmasi berikut :



Tekan  untuk melanjutkan proses atau tekan  untuk membatalkannya.

- c. Setelah proses ekspor selesai akan muncul informasi data-data yang berhasil diekspor. Klik  kemudian klik  untuk keluar dari menu ini.

Impor Data Saldo Awal

Untuk impor data langkah-langkahnya sama dengan ekspor data saldo Awal.

Ekspor Impor Data Posting Jurnal

Untuk impor data langkah-langkahnya sama dengan ekspor impor data saldo Awal.

B. LAPORAN

Langkah preview dan cetak laporan adalah sebagai berikut :

1. Klik menu Laporan, pilih SKPKD – Pembukuan Akrual maka akan tampil halaman pilihan laporan dan parameter seperti :

Laporan Pembukuan Akrual SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10

KODE REKENING

Pilihan Laporan

- ☒ Rekening
- ☐ Jurnal
- ☐ Buku Besar
- ☐ Buku Besar Pembantu
- ☐ Buku Besar Pembantu (per No. Bukti)
- ☐ Neraca
- ☐ Laporan Arus Kas
- ☐ Laporan Realisasi Anggaran
- ☐ Laporan Operasional
- ☐ Laporan Perubahan Ekuitas
- ☐ Laporan Perubahan SAL
- ☐ Memo Pembukuan
- ☐ Memo Jurnal
- ☐ Daftar Saldo Buku Besar
- ☐ Rincian Saldo Buku Besar
- ☐ Saldo Buku Besar Konversi SAP
- ☐ Daftar Jurnal Yang Belum Di-Posting

Tanggal : [Dropdown]

Urusan : [Dropdown]

Bidang : [Dropdown]

Unit / Perangkat Daerah : [Dropdown]

Sub Unit : [Dropdown]

Program : [Dropdown]

Kegiatan : [Dropdown]

Jenis Rekening : [Dropdown]

Level Rekening : [Dropdown]

Footer : [Dropdown]

Akun : [Dropdown]

Kelompok : [Dropdown]

Jenis : [Dropdown]

Objek : [Dropdown]

Rincian Objek : [Dropdown]

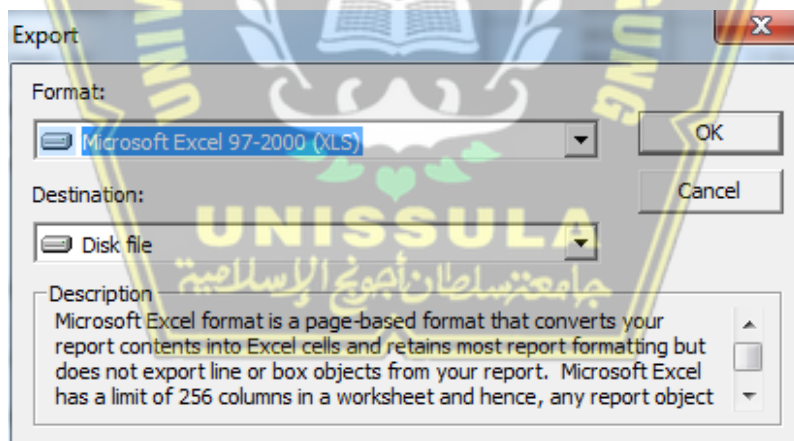
2. Pilih laporan yang akan dicetak kemudian klik tombol Preview untuk menampilkan laporan pada layar monitor seperti tampilan dibawah ini(sebagai Contoh Preview Laporan Operasional) :

 PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10 LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2014	SALDO 2013	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	5.500.000,00	135.200.000,00	(129.700.000,00)	(95,93)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	600.000,00	135.200.000,00	(134.600.000,00)	(99,56)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	200.000,00	117.750.000,00	(117.550.000,00)	(99,83)
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	300.000,00	17.450.000,00	(17.150.000,00)	(98,28)
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sali - LO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9	BEBAN	2.205.000,00	135.200.000,00	(132.995.000,00)	(98,37)
9.1	BEBAN OPERASI	1.905.000,00	135.200.000,00	(133.295.000,00)	(98,59)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	150.000,00	20.200.000,00	(20.050.000,00)	(99,26)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	295.000,00	115.000.000,00	(114.705.000,00)	(99,74)
9.1.5	Beban Hibah	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
9.2	BEBAN TRANSFER	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	0,00

Simulasi, 09 Juni 2014

3. Klik tombol  untuk melakukan pencetakan laporan.

Untuk ekspor data ke file dengan format lain klik tombol , pilih format file akan muncul tampilan berikut :



Export

Format:

 Microsoft Excel 97-2000 (XLS)

Destination:

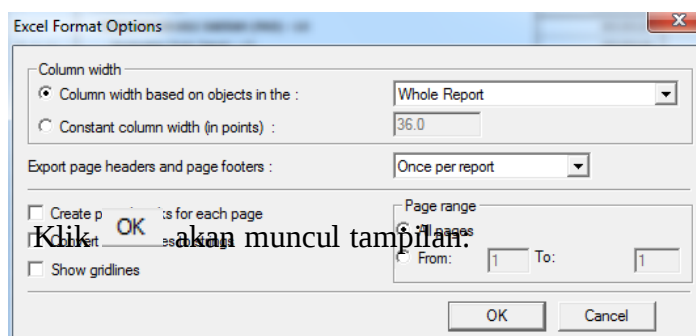
 Disk file

Description

Microsoft Excel format is a page-based format that converts your report contents into Excel cells and retains most report formatting but does not export line or box objects from your report. Microsoft Excel has a limit of 256 columns in a worksheet and hence, any report object

OK Cancel

Klik  akan muncul tampilan:



Excel Format Options

Column width

☒ Column width based on objects in the : Whole Report

☐ Constant column width (in points) : 36.0

Export page headers and page footers : Once per report

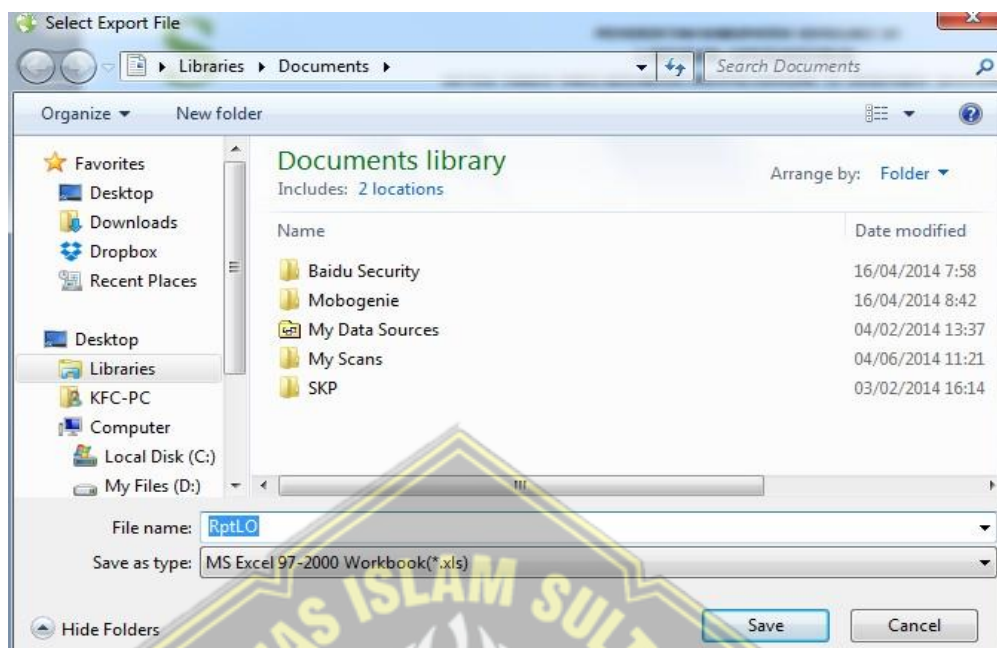
☐ Create page headers for each page

☐ Show gridlines

Page range

From: 1 To: 1

OK Cancel



Ketik nama file dan pilih folder dimana file akan disimpan, klik **Save** untuk menyimpan atau klik **Cancel** untuk membatalkan ekspor data. Contoh file hasil ekspor ke file .xls adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI 10 LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2014	SALDO 2013	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
5	PENDAPATAN - LO	5.500.000,00	135.200.000,00	(129.700.000,00)	(95,93)
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	600.000,00	135.200.000,00	(134.600.000,00)	(99,56)
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	200.000,00	117.750.000,00	(117.550.000,00)	(99,83)
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	300.000,00	17.450.000,00	(17.150.000,00)	(98,28)
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sali - LO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9	BEBAN	2.205.000,00	135.200.000,00	(132.995.000,00)	(98,37)
9 . 1	BEBAN OPERASI	1.905.000,00	135.200.000,00	(133.295.000,00)	(98,59)
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	150.000,00	20.200.000,00	(20.050.000,00)	(99,26)
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	295.000,00	115.000.000,00	(114.705.000,00)	(99,74)
9 . 1 . 5	Beban Hibah	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
9 . 2	BEBAN TRANSFER	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	0,00

Simulasi, 09 Juni 2014

3. Pengembangan SIMDA Keuangan

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Bidang Keuangan, Ibu Nur Fauziah yaitu Pada pengembangan penerapan SIMDA Keuangan di Bidang Keuangan melakukan beberapa upaya dalam pengembangan SIMDA agar kualitas laporan keuangan dalam penggunaan SIMDA berkualitas baik. Berikut ini pengembangan SIMDA Keuangan yang dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Kudus : Upaya tersebut yaitu perbaikan jaringan dengan menggunakan WIFI yang dapat menjangkau ruangan yang digunakan dalam mengelola SIMDA Keuangan, yakni Bidang Keuangan. Selain itu Dinas PUPR Kabupaten Kudus menyediakan kursus untuk beberapa karyawan agar dapat mengelola laporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan.

Upaya yang dilakukan dalam penerapan SIMDA Keuangan pada Bidang Keuangan Sekretariat Dinas PUPR Kabupaten Kudus

Dalam menerapkan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terdapat beberapa upaya yang dilakukan agar penerapannya berjalan sesuai dengan alur, seperti apa yang tercantum dalam (PP NO. 71 SAP, 2010) tentang strategi penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu :

a) Perbaikan Jaringan

Komitmen dari para stakeholder mengenai penerapan aplikasi SIMDA Keuangan diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan daerah yang lebih riil dan sesuai dengan output maupun inputnya. Dengan adanya aplikasi SIMDA Keuangan membantu penerapan akuntansi berbasis akrual lebih mudah karena sistem SIMDA Keuangan terintegrasi. Oleh karena itu Dinas PUPR Kabupaten

Kudus melakukan upaya perbaikan jaringan dan WIFI agar dapat membantu karyawan dalam proses pengelolaan laporan keuangan sehingga waktu pengerjaan laporan keuangan menjadi lebih efisien.

b) Pelatihan Untuk User SIMDA Keuangan

Penggunaan SIMDA Keuangan oleh karyawan di Bidang Keuangan belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam proses pengelolaan dan penggunaan SIMDA. Oleh karena itu Dinas PUPR Kabupaten Kudus melakukan upaya mengadakan kursus pelatihan dasar secara mandiri guna memberi bekal karyawan di Bidang Keuangan, latar belakang pendidikan karyawan bukan berasal dari yang berpendidikan di bidang teknologi.

6.2.2 Kesesuaian Output SIMDA Keuangan dengan SAP

Dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik diperlukan adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintahan, karena melalui proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan kepada berbagai pihak (Putri, 2022). Perubahan bidang akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan diperlukannya Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang merupakan SAP adalah persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dengan diterapkannya SAP diharapkan laporan keuangan pemerintah dapat disajikan secara efektif dan efisien sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Yanti et al., 2020)(Yanti et al., 2020)

Berikut hasil wawancara dengan beberapa Staff Bagian Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus :

a) Kesesuaian SIMDA dengan PP NO. 71 tentang SAP

- 1) *“Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”* (PP NO. 71 SAP, 2010) pasal 1 ayat 3.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan Ibu Diah Winarni mengungkapkan Bidang Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus menggunakan *“SAP No. 71 tahun 2010 sebagai bahan dasar dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan anjuran dari pemerintah”*.

Dalam hal tersebut Dinas PUPR Kabupaten Kudus menerapkan SAP No.71 2010 sebagai dasar pengelolaan laporan keuangan dan dasar hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

- 2) *“Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban dan ekuitas”* (PP NO. 71 SAP, 2010)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Ibu Nur Fauziah mengungkapkan bahwasanya *“di Bidang Keuangan menggunakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan*

pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh APBD, dan SAP berbasis akrual ini berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan”.

Daalam hal ini dasar yang digunakan oleh SIMDA Keuangan sudah sesuai dengan PP NO. 71 Tahun 2010 tentang SAP yaitu berbasis akrual dengan pengakuan pendapatan, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas.

b) Informasi yang Disajikan / Dihasilkan Oleh SIMDA Keuangan

“Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan standar akuntansi pemerintah”

(PP NO. 71 SAP, 2010)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Keuangan Bapak Nur Akhwan mengungkapkan *“Dalam menunjukkan akuntabilitas pelaporan tersebut ada 4 faktor yaitu : a) memberikan informasi terkait posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. b) memberikan informasi terkait perubahannya. c) memberikan informasi alokasi, sumber, penggunaan sumber daya ekonomi. d) memberikan informasi terkait ketepatan realisasi terhadap anggaran yang ditentukan. 4 hal tersebut digunakan sebagai pengambilan keputusan”.*

Dalam hal tersebut dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan keuangan ada 4 faktor yaitu informasi posisi, informasi perubahan, informasi alokasi, dan informasi realisasi anggaran dalam laporan keuangan.

c) Karakteristik Kualitatif Info Yang Dihasilkan Oleh SIMDA

- 1) *“Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Empat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami” (PP NO. 71 SAP, 2010)*

Dalam hal ini terdapat empat syarat dalam menunjukkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan karakteristik normative yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

- 2) *“informasi relevan memiliki manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap” (PP NO. 71 SAP, 2010)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Keuangan Ibu Mega Febriana mengungkapkan *“Informasi yang relevan merupakan informasi yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan dapat mengevaluasi laporan keuangan, hal itu diterapkan dalam umpan balik tersebut dan dapat memprediksi bagaimana pengerjaan laporan yang baik kedepannya, kemudian dalam pengerjaan laporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan sehingga meminimalisir terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan dan laporan keuangan disajikan secara lengkap. Dalam Bidang Keuangan Dinas PUPR laporan keuangan cukup berpengaruh dalam hal tersebut untuk menjadi evaluasi, dikarenakan masalah keterlambatan pelaporan laporan keuangan”*.

Dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Kudus menerapkan karakteristik kualitatif informasi relatif secara baik yaitu umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

- 3) *“Informasi yang andal memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas”* (PP NO. 71 SAP, 2010)

Berdasarkan wawancara dengan Staff Bidang Keuangan Ibu Cintya mengungkapkan *“Laporan keuangan yang dikerjakan disajikan secara jujur dan berdasarkan fakta berdasarkan transaksi, laporan keuangannya pun di ujikan oleh pihak yang berbeda, sehingga informasi yang dihasilkan bisa ditarik kesimpulan untuk bahan evaluasi”*.

Dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Kudus menerapkan karakteristik kualitatif informasi andal secara baik yaitu penyajian berdasarkan fakta dan jujur, dapat diverifikasi oleh pihak lain, dan netralis tidak memihak siapapun.

- 4) *“Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya”* (PP NO. 71 SAP, 2010)

Dalam hal tersebut informasi harus dapat dibandingkan dengan informasi periode sebelumnya guna menunjukkan entitas laporan keuangan.

- 5) *“Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal ”* (PP NO. 71 SAP, 2010)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Keuangan Ibu Suhartatik mengungkapkan *“Laporan keuangan harus dibandingkan antar periode dimana karakteristik ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi*

kecenderungan posisi dan kinerja keuangan sekaligus mengevaluasi posisi keuangan. Dalam Bidang Keuangan laporan keuangan periode tahun lalu dibandingkan dengan laporan keuangan yang terbaru, begitupun siklusnya selalu dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya”.

Dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Kudus menerapkan karakteristik kualitatif informasi dapat dibandingkan guna mengetahui posisi keuangan.

- 6) *“Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna” (PP NO. 71 SAP, 2010)*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan Ibu Diyah Winarni mengungkapkan *“Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan disebut dapat dipahami apabila pengguna mengerti dan memahami isi atau informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga manfaatnya membantu pengguna dalam pengambilan keputusan agar tujuan tercapai”.*

Dalam hal tersebut Dinas PUPR Kabupaten Kudus mengharapkan penerapan karakteristik kualitatif informasi ini bermanfaat bagi seluruh staff bidang keuangan agar dapat memahami dan mampu dalam pengambilan keputusan.

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif informasi yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah relevan, informasi keuangan yang andal, informasi keuangan yang dapat dibandingkan, dan informasi yang dapat dipahami. Hal tersebut telah diterapkan dan diyakini mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan di Bidang Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus menggunakan Pendekatan *Formal Evaluation* (Evaluasi Formal) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman user/pengguna terhadap SIMDA belum optimal, hal ini disebabkan karena : (1) Penggunaan SIMDA Keuangan yang masih baru dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. (2) Kurangnya pengembangan aplikasi secara penuh sehingga kinerja user/pengguna dalam mengelola dan menginput data menjadi terhambat. (3) Jaringan yang belum stabil sehingga terjadi gangguan.
2. Kepuasan penggunaan SIMDA Keuangan oleh Karyawan menunjukkan tingkat sedang, hal ini dikarenakan : (1) SIMDA dapat mempersingkat waktu pembuatan laporan keuangan. (2) Infrastruktur yang belum memadai karena terbatasnya jaringan WIFI.
3. Pengembangan SIMDA dilakukan dengan beberapa upaya yaitu : (1) Perbaikan jaringan dan WIFI, agar pengelolaan laporan keuangan tidak terhambat yang berakibat pada terlambatnya proses penyajian laporan keuangan. (2) Pemberian pelatihan dasar secara mandiri berupa buku

panduan guna meningkatkan kemampuan menggunakan SIMDA Keuangan dengan baik sehingga output dari SIMDA Keuangan menjadi akurat.

4. Kesesuaian output SIMDA dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Kesesuaian output SIMDA dengan SAP dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Output SIMDA sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (2) Karakteristik kualitatif laporan keuangan telah memenuhi kualifikasi : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Empat hal tersebut yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan terhadap pengambilan keputusan dalam penyajian laporan keuangan di Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

7.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, akan memberikan rekomendasi dalam penerapan SIMDA Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah di Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

1. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan pelatihan dasar dalam penerapan SIMDA Keuangan kepada staff/karyawan Bidang Keuangan secara lebih intensif sehingga pemahaman masing-masing staff yang mengikuti pelatihan memahami secara detail definisi dari SIMDA Keuangan dan fungsi penggunaannya.
2. Pemerintah perlu melakukan perbaikan pelayanan teknologi dan memberikan fasilitas infrastruktur yang menunjang, yakni penerapan WIFI pada ruangan bidang keuangan mengingat SIMDA Keuangan merupakan sebuah sistem

yang menggunakan jaringan internet. Hal ini agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak terlambat.

3. Perlu adanya dukungan dari staff Bidang Keuangan yang menggunakan aplikasi SIMDA untuk ikut serta menyukseskan program dari pemerintah terkait penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik sesuai dengan PP No. 71 2010 tentang SAP.



BAB VIII

REFLEKSI DIRI

Menjadi seorang mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak semua mahasiswa bisa mengemban amanah untuk menjaga dan merealisasikan tanggung jawab tersebut. Kegiatan magang yang penulis lakukan selama kurang lebih empat bulan membuat penulis sadar bahwa tanggung jawab yang diemban selama masa kuliah tidak seberat tanggung jawab yang diemban di dunia kerja.

Pada kegiatan magang yang penulis lakukan di Dinas PUPR Kabupaten Kudus pada 14 Februari hingga 13 Juli ini penulis mendapatkan banyak pengalaman pada bidang manajemen dan akuntansi baik softskill maupun hardskill seperti manajemen waktu hingga komunikasi interpersonal. Tugas-tugas yang diberikan ketika magang memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis karena melatih keterampilan serta menambah pengetahuan penulis dalam berbagai aspek yang didapat. Penulis mendapat wawasan praktik dunia kerja melalui masalah dan solusi yang ada melalui brainstorming yang dilakukan saat bekerja terutama dalam penyusunan laporan keuangan, hingga serta standar pelayanan publik. Hal tersebut menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang problem solving.

Keterlibatan penulis dalam penyusunan laporan keuangan juga menambah pengetahuan penulis mengenai bagaimana cara mengelola laporan keuangan pemerintah. Ilmu yang didapatkan dalam perkuliahan juga mempermudah penulis dalam menjalankan tugas selama magang.

Pengalaman magang ini juga membuat penulis memahami kekurangan dan kelebihan yang penulis miliki sehingga penulis dapat meningkatkan softskill, namun penulis kurang dalam hal mempelajari sistem aplikasi online pemrograman suatu instansi. Selama menjalani kegiatan magang penulis menemukan problem yang ada di dalam dunia kerja, baik dari sumber daya manusia maupun lingkungan tempat bekerja. Hal tersebut membuat penulis merasa bahwa jika ingin diterima baik maka kita harus bersikap dengan baik, dan membuat penulis merasa bahwa ingin memiliki wawasan yang luas dan keberanian untuk membuat perubahan yang besar pada diri penulis.

Kekurangan dan kelebihan penulis dalam kegiatan magang akan penulis kembangkan dan evaluasi kembali guna perbaikan dan persiapan diri di dunia kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustiandra, vindi, & Sabandi, A. (2019). Persepsi Guru Terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akademik di SMK Negeri 3 Padang. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 8(1).
- Akbar, F., & Mohi, K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan. In *Ideas Publishing* (Vol. 1, Issue 69).
- Arikunto, P. D. S. (2021). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (D. Restu (ed.); Ketiga). PT. Bumi AKsara.
- Badan, P. K. (2020). *Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Daerah*. <http://www.bpkp.go.id/sakd/>
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Gajah Mada.
- Erviana. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kota Palu). *E Jurnal Katalogis*, 5(4), 182–193.
- Indonesia, B. P. K. R. (2016). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat*. 30 Desember 2016. BN.2016/NO.2159,jdih.kemenkeu.go.id : 5 hlm.
- Indra, B. (2010). *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar* (S. Saat (ed.); Ketiga). Erlangga. <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=486>
- John P. Campbell, Richard J. Campbell, and A. (1988). *Human Resource Development Quarterly* (Richard A. Swanson (ed.)). Summer. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/hrdq.3920010211>
- Joyce, B., & Weil, M. (2003). Fifth Edition Models of Teaching. *Prentice Hall of India*, 1–479.
- Komang, N., Mahartini, A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem*. 1.
- Maria Suryaningsih, M. H. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 5, 175–185.

- Mulyani, A., & Kurniadi, D. (2015). Analisis Penerimaan Teknologi Student Information Terminal (S-IT) Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Wawasan Ilmiah*, 7(12), 23–35.
- Muryadi, A. D., & Universitas. (2017). *Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi*. 3(1), 1–16.
- Nuruddin, A. &. (2022). Sistem Informasi Manajemen. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69).
- Peraturan Pemerintah. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) No 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*, 14, 1–20. www.bphn.go.id
- Permendagri, N. 59. (2007). *Menteri dalam negeri republik indonesia*. 1–13.
- Pp No. 71 Sap. (2010). *Pp No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pratama, S. Y. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 153. <https://doi.org/10.52239/jar.v4i2.600>
- Prof. Erlina, Drs. Rasdianto, O. S. R. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual* (Ketiga). Salemba Empat.
- Purnamasari, A. M., Magdalena, I., & Rosnaningsih, A. (2020). Analisis Penggunaan Huruf Kapital Dan Tanda Baca Pada Paragraf Deskriptif Siswa Kelas 4 Sdn Binong Ii Kabupaten Tangerang. *Indonesian Journal of Elementary Education (IJOEE)*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.31000/ijoe.v1i1.2564>
- Putri, R. D. (2022). *Reviu Laporan Keuangan Dan Penerapan Sap Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 2(1).
- Stoner, J. A. . (1996). *Manajemen Jilid 1* (Edisi Baha). Prenhallindo.
- Suteja, I. G. N. (2018). Analisis kinerja keuangan dengan metode Altman Z-Score Pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk I Gede Novian Suteja. *Jurnal Moneter*, 5(1), 12–17.
- Yanti, N. S., Made, A., & Wahyu, S. (2020). *Studi Empiris pada OPD Kota Malang*. 8(1).